



# LAPORAN 4 TRIWULAN 2022



# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>4</b>
<b>I. RENCANA KERJA ICCTF TAHUN 2022</b>	<b>6</b>
<b>II. PROGRES DAN CAPAIAN</b>	<b>11</b>
<b>1. Progres Proyek</b>	<b>12</b>
A. COREMAP–CTI Asian Development Bank	28
B. Blue Finance	31
C. Blue Carbon AFD	34
D. Kegiatan Strategis Rupiah Murni	39
E. Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)	39
<b>2. Undangan Narasumber, Program Strategis, Potensi Kerja Sama, dan Penggalangan Dana (fundraising)</b>	<b>40</b>
A. Road to Ocean 20 Workshop: Workshop on Blue Carbon of Seagrass Ecosystem and Livelihood	40
B. Integrated Coastal Management ICM Knowledge Forum PEMSEA Network of Local Governments	41
C. Diskusi dengan Ibu Elshinta, Ketua Yayasan Laut Lestari Indonesia	41
D. Diskusi Kajian Awal Strategi Pengembangan Undang Nasional	42
E. Undangan Pertemuan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang NDC sebagai Tindak Lanjut Perpres No.98 Tahun 2021	42
<b>3. Komunikasi, Outreach dan Kemitraan</b>	<b>44</b>
A. Media Sosial	44
B. Produksi Materi dan Produk Komunikasi	47
C. Media Monitoring	48
<b>III. AUDIT, KEUANGAN DAN OPERASIONAL</b>	<b>53</b>
<b>1. Laporan Audit Tahun 2022</b>	<b>53</b>
<b>2. Informasi Keuangan Periode Oktober-November 2022</b>	<b>53</b>
<b>3. Operasional / Kesekretariatan</b>	<b>54</b>



## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) dalam bidang penanganan perubahan iklim. Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ICCTF mengelola dana APBN dan dana hibah dari mitra pembangunan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca serta implementasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dilaksanakan ICCTF meliputi pengelolaan proyek, penggalangan dana, komunikasi dan *outreach* serta operasional Satker. Dalam hal pengelolaan proyek, ICCTF membagi proyek-proyek yang dikelola berdasarkan *thematic windows* ke dalam empat fokus area, yaitu i) *Land-based Mitigation*; ii) *Adaptation and Resilience*; iii) *Energy*, dan; iv) *Marine-based*. Sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan laut dan sumber dayanya, saat ini ICCTF menitikberatkan fokus pada tema program berbasis kelautan (*Marine-based*) sejak tahun 2020.

Proyek hibah COREMAP – CTI World bank (WB) yang dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu TNP Laut Sawu, SAP Waigeo Sebelah Barat, KKPD Raja Ampat, dan SAP Raja Ampat di 2 provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat telah selesai diimplementasikan. Selanjutnya diharapkan hasil dari implementasi proyek COREMAP-CTI WB dapat berkontribusi besar dalam Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA).

ICCTF juga sedang mengimplementasikan kegiatan COREMAP – CTI Asian Development Bank (ADB) yang dilaksanakan oleh Konsultan Perusahaan dan LSM. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berada di 3 lokasi di KKPD Nusa Penida, Provinsi Bali; TPK Gili Balu, dan TWP Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode ini kegiatan yang dicapai adalah Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), Kajian untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang, dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung ekowisata telah memasuki tahapan

final. Kegiatan konservasi yaitu penanaman mangrove telah dilakukan.

Sedangkan untuk *Blue Finance*, ICCTF telah melakukan pertemuan dengan mitra pembangunan, serta Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan dokumen *Blue Finance Instruments Development Guideline* dan *Blue Finance Policy Note*. Dokumen tersebut telah selesai disusun dan secara resmi telah diluncurkan langsung oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas, serta sudah dapat diunduh di website ICCTF.

Kegiatan *Blue Carbon* pada periode ini dengan AFD telah mencapai kesepakatan melalui *Financing Agreement* yang telah ditandatangani Sekretaris Kementerian PPN dan Country Director AFD Indonesia untuk mendanai proyek blue carbon selama 3 tahun ke depan.

Program lainnya juga telah dilakukan yaitu terkait Pengembangan Sistem Pelaporan dan Monitoring Produksi Perikanan Udang di Laut Aru-Arafura dan Pengembangan Konektivitas Ekowisata Bahari di Bali Nusra juga telah mencapai akhir. Hasil kajian sudah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan terakit. Selain itu pembahasan tentang potensi dukungan pendanaan lain masih terus dilanjutkan.

Hasil kegiatan diwartakan dalam website ICCTF dan melalui media sosial ICCTF. Selain itu kerjasama penyebaran informasi kegiatan lapangan juga menggunakan media sosial yang dilakukan bersama-sama dengan Mitra Pelaksana. Perbaikan website ICCTF mulai dilakukan pada masa ini. Selanjutnya tim komunikasi ICCTF melakukan analisis media sosial setiap akhir bulan guna melihat perkembangan sosialisasi program kepada masyarakat umum.



1

# RENCANA KERJA ICCTF TAHUN 2022

**Q1**  
JAN – MAR

#### **Pengelolaan Proyek**

- Monev dan *spotcheck* Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Pengadaan konsultan COREMAP–CTI ADB
- Pelaksanaan beasiswa *master degree* COREMAP–CTI ADB
- Pemeriksaan Asset COREMAP-CTI WB

#### **Penggalangan Dana**

- Persiapan proyek Blue Finance ADB

#### **Komunikasi**

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik
- Distribusi kalender ICCTF 2022

#### **Dukungan Operasional**

- Exit Strategy
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal I ICCTF 2022

**Q2**  
APR – JUN

### **Pengelolaan Proyek**

- Monitoring lapangan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Pengadaan konsultan COREMAP–CTI ADB
- Studi bioekonomi Tuna, Kakap Merah dan rumput laut di Lesser Sunda

### **Penggalangan Dana**

- Persiapan proyek Blue Finance

### **Komunikasi**

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

### **Dukungan Operasional ICCTF**

- Audit BPK
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal II ICCTF 2022

**Q3**  
JUL - SEP

#### **Pengelolaan Proyek**

- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

#### **Penggalangan Dana**

- Persiapan proyek Blue Finance

#### **Komunikasi**

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

#### **Dukungan Operasional ICCTF**

- Workshop Koordinasi Kuartal III ICCTF 2022

# Q4

OCT - DEC

## **Pengelolaan Proyek**

- *Programmatic and Finance Monitoring*
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi dan pelaporan studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

## **Penggalangan Dana**

- Implementasi Proyek Blue Finance

## **Komunikasi**

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan media elektronik
- Produksi Kalender ICCTF 2023

## **Dukungan Operasional ICCTF**

- Workshop Koordinasi Kuartal IV ICCTF 2022



**2**

PROGRES dan  
**CAPAIAN**

# 1 | PROGRES PROYEK

## A. COREMAP–CTI Asian Development Bank

### Kegiatan PIU COREMAP-CTI ADB

a

#### Pembahasan Pembangunan Menara Pengawas di Gili Balu



Gambar 1.A.1. Diskusi tindak lanjut pembangunan menara

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan agenda pembahasan tindak lanjut kesepakatan pembangunan kembali Menara Pengawas di Pulau Paserang. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Progress pembangunan di pulau Namo per 4 Oktober 2022 sudah mencapai 43%.
- ICCTF tidak menyetujui opsi melanjutkan pembangunan menara pulau Paserang/ tidak dibangun ulang.
- Kontraktor perlu bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan DED yang sesuai dengan kontrak dengan Sucofindo
- Sucofindo berkomitmen untuk menyelesaikan semua output
- Pembangunan menara di Pulau Paserang yang baru segera dibangun secepatnya namun menara yang lama untuk sementara tetap dipertahankan dulu
- Sebagai tindak lanjut akan dilakukan kunjungan lapang oleh tim ICCTF dan tim tenaga ahli untuk melakukan penentuan lokasi pembangunan yang baru.

# b

## Konsultasi penyusunan Laporan Semi Annual Safeguard Monitoring Report (Sosial) dengan Safeguard Spesialis ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan agenda pembahasan Kesesuaian dokumen safeguard dengan hasil review dari ADB. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

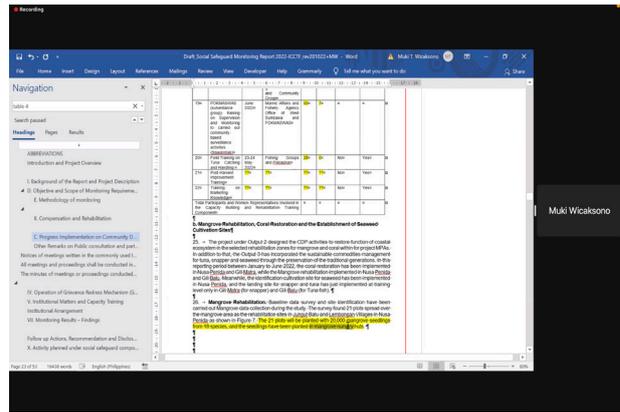
- Substansi dokumen dibikin lebih singkat, padat, dan jelas
- Bagian executive summary tidak diubah banyak
- Jumlah community group: 9 Nusa Penida, 8 Gili Matra, 13 Gili Balu, komposisi anggotanya 30,5% perempuan.
- Pada jalur wisata mangrove harus ada pembatasan area untuk jalur nelayan rumput laut. Detail pelaksanaan di lapangan akan di pantau minggu depan.

# c

## Pembahasan Progress Pembangunan GP2, GP3 dan GP5

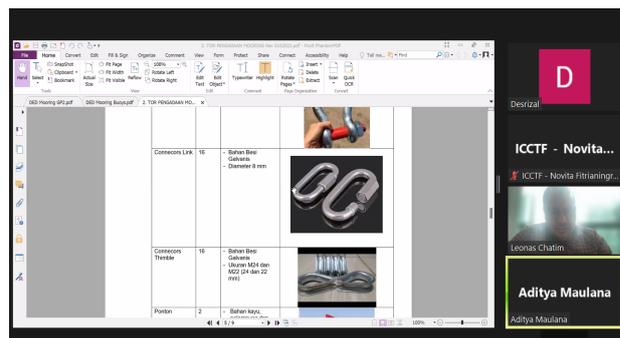
Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan agenda pembahasan pembangunan yang dilakukan oleh GP2, GP3 dan GP5. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- GP2 akan membuat kronologis terkait penggunaan besi beton dengan bentuk drum dalam konstruksi mooring buoy
- Progress pembangunan Pondok Informasi GP2 per 26 Oktober 2022 sudah mencapai 70%



Gambar 1.A.1. Diskusi tindak lanjut pembangunan menara

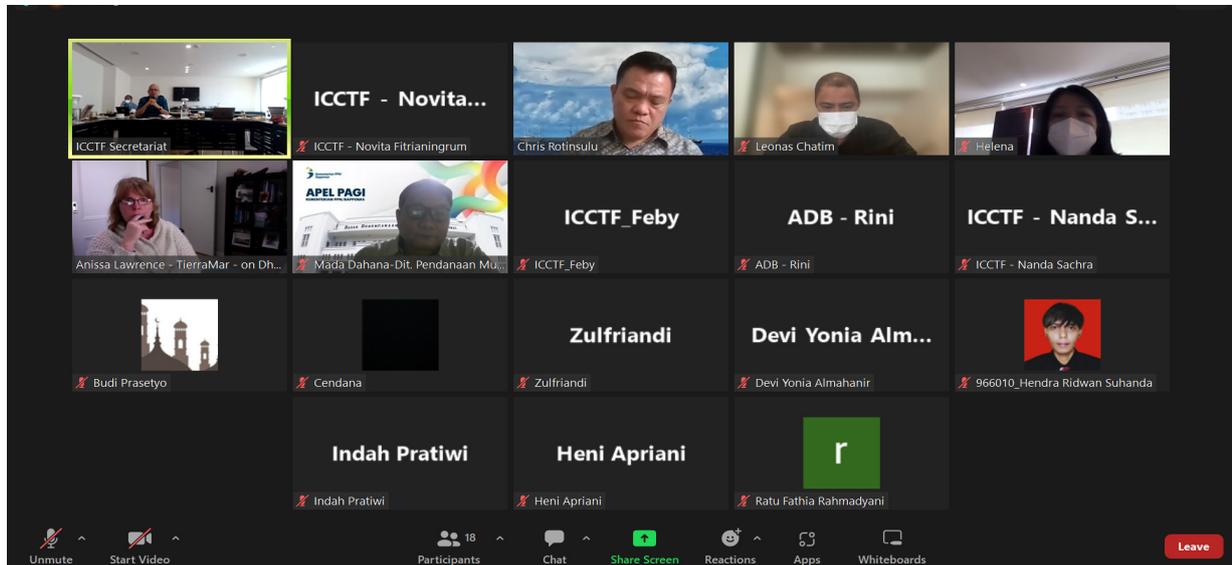
- Point by point untuk technical plannya bisa dijabarkan di laporan juga (mengenai pembangunan mangrove tracking), dimasukkan ke periode Juni – Desember
- Focal point GRM nya ada yang pakai kontraktor dan site coordinator, tapi lebih menitikberatkan kepada kontraktor
- Laporan dari kontraktor mungkin bisa dimasukkan ke laporan safeguard monitoring report berikutnya
- Angka-angka kegiatan, pelatihan, community group, tolong dilengkapi di laporannya.



Gambar 1.A.3. Diskusi pembahasan progress pembangunan GP2, GP3, dan GP5

- Progress pembangunan pos pengawasan di Gili Trawangan oleh GP5 sudah mencapai 18% berdasarkan kurva S

## d Pembahasan MTR Report GEF



Gambar 1.A.4. Diskusi pembahasan MTR Report

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022 di hotel Pullman dan melalui aplikasi Zoom. Agenda kegiatan ini adalah pembahasan hasil MTR COREMAP CTI ADB oleh GEF. Beberapa poin penting hasil dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- COREMAP-CTI adalah proyek katalitik untuk Indonesia dan negara-negara Segitiga Terumbu Karang lainnya, menyediakan tempat pembelajaran tentang cara memperkuat efektivitas pengelolaan serta pembiayaan untuk mempertahankan fungsi jasa ekosistem di KKL
- Peluang dan pelajaran dari proyek ini diharapkan dapat diterapkan oleh KKP ke KKL lain dan membantu memperkuat efektivitas KKL dan mengembangkan model pembiayaan berkelanjutan bagi Indonesia untuk mengelola kawasan konservasi perairannya
- Sebelum proyek berakhir, penting untuk memastikan komunikasi efektif yang kuat dan perluasan temuan dan hasil serta pembelajaran dilakukan dengan KKP, pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten, serta LSM
- COREMAP-CTI memberikan contoh yang baik, dengan hasil nyata yang dapat dibuktikan atas dasar bagaimana memperkuat efektivitas KKP dalam jangka waktu singkat, membangun dan memperkuat upaya yang ada. Proyek ini telah memperoleh manfaat, seperti halnya para pemangku kepentingan di lokasi KKL dari pembentukan kemitraan awal dan inklusif, menggabungkan ilmu pengetahuan dengan masyarakat dan pengelolaan dengan cara yang kreatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP.
- Proyek ini selanjutnya telah menunjukkan pentingnya ilmu praktis yang diperlukan untuk mendukung kebijakan dan keputusan oleh pengelola KKL dan masyarakat untuk memahami bagaimana menerapkan tindakan pengelolaan secara praktis.
- Proyek ini kemudian juga telah memberikan pendekatan yang nyata tentang bagaimana mengatasi tantangan utama yang dihadapi efektivitas manajemen dan bagaimana menggunakan pelajaran untuk memperkuat pekerjaan lain di masa depan.

# e

## Pembahasan Snapper/ Kakap Merah dengan GP7

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022 di Hotel Padjadjaran Bogor.

Agenda kegiatan ini adalah FGD

Hasil Kajian Rantai Pasok dan Pemasaran Ikan Kakap Merah di wilayah Lesser Sunda. Beberapa poin penting hasil dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- Dari dokumen kajian yang sudah tersedia, perlu ditambahkan rekomendasi untuk stakeholder engagement, jadi selain mapping dan identifikasi peran, kita juga perlu mengetahui cara pelibatan stakeholder terkait.
- Potensi Kakap merah masih besar baik di pasar domestik dan ekspor, untuk bisnis maupun rumah tangga.



Gambar 1.A.5. FGD hasil kajian rantai pasok dan pemasaran ikan kakap merah

- Sebagai informasi untuk penguatan informasi stakeholder pada kajian, BKIPM secara aktif melakukan inspeksi, evaluasi, pembinaan, dan sertifikasi di tingkat supplier kakap merah, untuk menjaga mutu dan daya saing produk.
- Beberapa perusahaan yang tercantum di presentasi sepertinya belum pernah diberi izin untuk pemasaran Kakap Merah oleh DKP NTB.
- Dokumen masih perlu banyak tambahan masukan dari pihak. Konsultan akan mengirimkan lagi via email untuk meminta masukan.

# f

## Kunjungan Pemantauan Perkembangan Proyek COREMAP CTI ADB di Gili Balu

Kunjungan lapang ini dilaksanakan pada tanggal 1-3 Desember 2022 di Gili Balu, NTB. Maksud dan tujuan dari kunjungan lapang ini adalah memastikan *Means of Verification* (MoV) dan pembangunan infrastruktur telah sesuai serta memastikan dampak yang berkelanjutan bisa dirasakan oleh para penerima manfaat (kelompok POKLASHAR). Beberapa poin penting hasil dari kunjungan lapang ini adalah:

- Pembangunan pondok ekowisata di Gili Balu sudah 100%, pekerjaan yang tersisa adalah clearing area pasca konstruksi



Gambar 1.A.5. Diskusi dengan kelompok masyarakat

- 95% peralatan kantor CDK dan Pondok Ekowisata telah tersedai dengan spek dan jumlah yang sesuai
- 8 mooring buoy telah terpasang 100%
- Progress pembangunan menara di Paserang sudah mencapai 55%
- Progress pembangunan menara di Namo sudah mencapai 80%
- Semua peralatan Pokmaswas yang telah dititipkan dalam keadaan baru dan dapat berfungsi dengan baik

## g Pembahasan Update COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 di ruang rapat ICCTF. Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas *update progress* dari kunjungan

lapang yang telah dilakukan di Gili Balu, Gili Matra dan Nusa Penida. Beberapa poin penting hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Gili Balu: Pembangunan menara di Paserang diperkirakan akan selesai 100% pada tanggal 15 Desember dan maksimal 20 Desember untuk finishing. Menara di Namo akan selesai sampai finishing pada tanggal 15 Desember 2022. Semua solar panel perlu di uji coba. Solar



Gambar 1.A.6. Diskusi update progress COREMAP-CTI ADB

panel yang rusak akan dilakukan penggantian bukan diperbaiki. Pondok informasi sudah bagus, namun air masih belum ada.

- Gili Matra: VMS menunggu jadwal sosialisasi untuk menentukan partner yang akan bergabung. Ada kendala dana untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Coral rehabilitasi sudah 80%
- Nusa Penida: Pembangunan Mangrove Tracking dan Pos Pengawasan perlu dikejar dan dipercepat.

## h Kunjungan Lapang GP7 di Benoa, Bali

Kunjungan lapang ini dilaksanakan pada tanggal 8-10 Desember 2022 di Benoa, Bali. Maksud dan tujuan dari kunjungan lapang ini adalah dalam rangka mengikuti Program Arafura & Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) serta mengonfirmasi data dan hasil model bioekonomi perikanan Rawai Tuna Grant Package 7 di Benoa Bali. Beberapa poin penting hasil dari kunjungan lapang ini antara lain sebagai berikut:

- Dasar analisis kajian ini merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh tim pada saat melakukan survey wawancara dan kuisisioner yang dibagikan ke beberapa



Gambar 1.A.7. Diskusi pembahasan MTR Report

perusahaan pada bulan Februari sampai April 2022.

- Kondisi stok dunia untuk tuna sirip kuning saat ini memang berkurang atau dibatasi sehingga sudah diberlakukan kuota. Hal inilah yang menyebabkan segmen tuna sirip kuning tidak memperoleh profit, ditambah dengan adanya kenaikan biaya solar di harga Rp 17.000/liter.
- ATLI perlu memperkaya data yang dimilikinya sehingga menjadi sumber rujukan utama untuk data perikanan tuna longline di Benoa.
- GP7 selanjutnya akan melakukan pemaparan pada tanggal 13 Desember di Jakarta

# PROGRESS KEGIATAN MITRA PELAKSANA

## 1. Support for MPA Management and ETP NPOA Implementation

### PAKET KEGIATAN 1

PT Trans Intra Asia (PT TIA) berkonsorsium dengan Yayasan Bahtera Nusantara

#### a. Progress pengembangan Sistem pengelolaan turis berbasis online (TMS)

Aplikasi system pengelolaan turis berbasis online ini akan digunakan oleh UPT KKP Bali dalam melakukan pengelolaan kunjungan wisata selam khususnya di Kawasan Mola, umpan balik pengelolaan Kawasan, pencatatan data kunjungan, sosialisasi kebijakan serta sebagai media komunikasi antara pemanfaat Kawasan dengan UPT KKP Bali dan stakeholder terkait.

#### b. Pelatihan ekowisata lestari

Pada tanggal 31 Oktober-1 November 2022 telah dilakukan pelatihan Pengelolaan Kegiatan Wisata Bahari Tingkat Operasional di Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada staff UPT KKP Bali dan Pelaku wisata perairan di KKP Nusa Penida. Kegiatan ini dilakukan di Inna Denpasar Hotel, diikuti oleh 30 orang peserta.



Gambar 1.A.8. Pemberian Sertifikat Pelatihan Kepada Seluruh Peserta

#### c. Pembangunan Pusat Informasi wisata dan Papan Informasi Videotron



Progress pembangunan pondok informasi dan pemasangan papan informasi digital sudah mencapai 100%, seluruh peralatan pondok informasi telah berada di Nusa Penida, namun pemasangan papan nama

“Pondok Informasi” direncanakan dilakukan di akhir bulan Desember. Pembuatan VMS dan sosialisasinya telah selesai dilakukan pada Desember 2022.

## PAKET KEGIATAN 2

PT Duta Cipta Mandiri berkonsorsium dengan PT Cakra Buana Aghna dan Yayasan Ekosistem Gili Indah/Gili Eco Trust

### a. Progress pembangunan Pondok Informasi

Pembangunan pusat informasi wisata terletak di Teluk Nara. Pembangunan ini dilakukan di lahan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara dan akan dikelola oleh Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata bersama dengan kelompok masyarakat POKDARWIS (kelompok ekowisata), POKLASHAR (kelompok pengolahan dan pemasaran) dan kelompok adat di wilayah tersebut. Pembangunan pondok informasi ini telah mencapai tahap akhir.



Gambar 1.A.10. Progress pembangunan Pusat Informasi GP2 di Teluk Nara, Lombok Utara

### b. Pembuatan materi publikasi

GP2 melakukan produksi brosur dan panflet untuk materi publikasi lokasi wisata menyelam di 3 gili dan membuat video dokumenter kawasan pariwisata di Gili Trawangan. Materi publikasi ini diletakkan di Pondok Informasi.



Gambar 1.A.11. Contoh materi publikasi GP2

### c. Finalisasi SOP

Finalisasi SOP prioritas yaitu SOP wisata selam dan SOP rehabilitasi terumbu karang dilakukan melalui beberapa tahapan finalisasi. Kegiatan pertama pada periode ini adalah pelengkapan data melalui survey pemanfaat wilayah selam dan survei penilaian komposisi substrat dasar perairan wisata selam

### d. Integrasi dan sinergi VMS dengan Retribusi daerah dan PNB

Proses ini merupakan Langkah final dalam pengembangan Visitor Management System yang dikembangkan. proses ini dilakukan dengan menghimpun data secara kolektif, survey dan analisis terkait carrying capacity, pendataan dan identifikasi kondisi sosial ekonomi dan budaya serta politik sebagai pendukung implementasi VMS.

Proses integrasi dan sinergi VMS dengan retribusi daerah dan PNB dilakukan untuk mengembangkan satu interface yang sama untuk mekanisme pembayaran berwisata menuju Gili Matra. pola ini dapat diimplementasikan setelah dihasilkannya payung hukum yang mencakup keseluruhan tata kelola penataan untuk efektifitas pengelolaan Gili Matra.

### e. Dukungan untuk NPOA hiu dan penyu

Kegiatan dukungan untuk NPOA hiu dan penyu dilakukan secara formal bersama BKKPN Kupang, kelompok masyarakat dan BKSDA. Hasil identifikasi dan temuan teknis akan menjadi rekomendasi teknis pada NPOA dalam bentuk rekomendasi pengelolaan kawasan dan program teknis secara berkelanjutan

### f. Diseminasi hasil studi kelayakan dan rencana bisnis ekowisata hiu

Beberapa rekomendasi teknis dari rencana bisnis ekowisata hiu antara lain dapat dilihat pada poin berikut:

- TWP gili matra memiliki 6 stasiun yang diperkirakan adanya hiu
- *Shark point* merupakan stasiun dengan keberadaan dan ketersediaan hiu terbanyak. Jenis hiu yang ditemukan pada kedua stasiun pengamatan *shark point* adalah *Triaenodon obesus* dan *chaharinus melanoptera*
- *Shark point* merupakan lokasi paling ideal untuk dijadikan wilayah eksklusif ekowisata hiu
- Daya dukung kawasan *shark point* dapat menampung sebanyak 52 orang perhari untuk luasan area 52,381 m<sup>2</sup>.
- Total benefit dari wisatawan local dengan ilia Rp 26.000.000/hari, dan dari wisatawan luar negeri sebesar \$ 2,730/hari. Jika dihitung setahun maka *shark point* menghasilkan menghasilkan nilai benefit sebesar Rp 9.490.000/tahun dari wisatawan lokal dan nilai benefit sebesar \$ 996,450/tahun

### g. Penyusunan materi publikasi video dan infografis untuk best practice dan lesson learned

Terdapat 10 video ekspositori yang akan dihasilkan yang terdiri dari 9 video best practice durasi pendek dan 1 video lesson learned durasi panjang. Sementara infografis yang dihasilkan sesuai dengan jumlah output dan desain Baliho untuk BKKPN Kupang.

PAKET  
KEGIATAN **3**

PT Cakra  
Buana Aghna

**a. Persiapan EVIKA TWP Gili Balu 2022**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2022, bertempat di Konyu Kafe Mataram Lombok, Kegiatan Persiapan EVIKA TWP Gili Balu 2022 membahas persiapan dokumen–dokumen yang perlu di disiapkan dari tim EVIKA serta melengkapi dokumen dari rekomendasi dari penilaian tahun 2021.



**Gambar 1.A.12.** Tim EVIKA mempersiapkan EVIKA TWP Gili Balu

**b. FGD Final Konsep PES: Draf Dokumen BLUD CDK Sumbawa – Sumbawa Barat**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan agenda membahas RENSTRA, SPM dan Tata Kelola serta Prognosis Keuangan BLUD yang di pimpin oleh tiga tim ahli dari mitra pelaksana GP3 dengan membagi peserta menjadi tiga kelompok yakni kelompok Renstra, kelompok SPM dan Tata Kelola serta kelompok Prognosis. Semua kelompok mendiskusikan terkait pembahasan yang telah di berikan serta membahas apa saja dokumen – dokumen yang di butuhkan. Kegiatan ini di akhiri dengan presentasi dari masing – masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi.



**Gambar 1.A.13.** FGD konsep final PES

### c. Konsultasi Teknis Rencana Pengelolaan Taman Wisata Perairan Gili Balu

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2022, bertempat di Prime Park Hotel & Convention Lombok, Kegiatan Konsultasi Teknis Rencana Pengelolaan Taman Wisata Perairan Gili Balu diawali dengan Pemaparan dokumen rencana pengelolaan dan Zonasi TWP Gili Balu oleh tim ahli GP3 dan selanjutnya dianggapi oleh peserta serta penyampaian visi dan misi dari pengelolaan dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara.



**Gambar 1.A.14.** Konsultasi Teknis Rencana Pengelolaan Taman Wisata Perairan Gili Balu

### d. Self Assessment EVIKA Taman Wisata Perairan Gili Balu

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022, bertempat di Prime Park Hotel & Convention Lombok, Kegiatan Self Assessment EVIKA Taman Wisata Perairan Gili Balu dilaksanakan untuk penilaian EVIKA tahun 2022 dengan perolehan nilai di tahun 2021 40,03 % menjadi 53,92% di tahun 2022 dengan status Perak (Dikelola Optimum) dengan beberapa rekomendasi dari tim penilai untuk di lengkapi untuk mencapai nilai yang maksimal hingga penandatanganan berita acara Evaluasi Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di tangani oleh Tim Penilai dan Kepala UPT Balai Pengelolaan SDKP Wil. Sumbawa- Sumbawa Barat.



**Gambar 1.A.15.** Self Assessment EVIKA Taman Wisata Perairan Gili Balu

### e. Koordinasi Finalisasi Zonasi TWP Gili Balu

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022, bertempat di Elfbelly Restaurant Mataram, Koordinasi Finalisasi Zonasi TWP Gili Balu dilaksanakan dengan tujuan menentukan sub sub zona yakni sub zona perikanan tangkap, sub zona perikanan budidaya dan zona Pariwisata akan tetapi DKP Prov NTB belum berani memutuskan secara langsung dari sub sub zona dan akan di bahas lebih lanjut terkait penentuan sub sub zona yang di maksud untuk mendapatkan kesepakatan bersama sesuai dengan aturan yang ada.



**Gambar 1.A.16.** Koordinasi Finalisasi Zonasi TWP Gili Balu

**f. FGD Draf Final BLUD UPT Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022 bertempat di Aston Inn Hotel, Mataram, Kegiatan FGD Draf Final BLUD UPT Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat diawali dengan penyampaian beberapa materi terkait BLUD serta pemaparan Draf Final BLUD dari tim ahli GP3 sekaligus penilaian atau masukan dan saran dari Dit. FKKPD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI dan masukan serta saran dari Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut DJPRL KKP RI.



**Gambar 1.A.17.** FGD Draf Final BLUD UPT BPSKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

**g. Pembangunan Ecotourism Center dan pengadaan peralatan.**

Progress pembangunan ekotourism center telah mencapai 100%, pengadaan peralatan ecotourism center dan pusat informasi MPA juga telah mencapai 100% pada bulan Desember 2022.



**Gambar 1.A.18.** Progress pembangunan pusat informasi ekowisata dan pengadaan peralatan

## h. Pembuatan dokumentasi dan publikasi

GP3 melakukan pembuatan 3 video dokumentasi berupa video kawasan, video pembelajaran dan video best practices, selain itu mitra juga membuat 3 desain flyer dan 2 desain brosur.



Gambar 1.A.19. Contoh materi publikasi GP3

## i. Pembuatan mooring buoy

Pemasangan mooring buoy ini merupakan upaya Proyek COREMAP-CTI ADB untuk mendukung upaya perikanan dan pariwisata berkelanjutan di KKP Gili Balu. Proyek ini melakukan pemasangan mooring buoy di 8 lokasi/titik, pemilihan titik melibatkan partisipasi masyarakat, nelayan, dan operator wisata, serta telah mendapatkan izin rencana tata ruang laut dari kementerian kelautan dan perikanan no. B.291/MEN-KP/V/2022.



Gambar 1.A.20. Mooring buoy GP3

## 2. Support for Ecosystem-based Resource Management Plans and Sustainable Marine-based Livelihoods

### PAKET KEGIATAN 4

Coral Triangle Center

#### a. Pembangunan Mangrove Tracking dan Bird Watching Tower

Progress pembangunan mangrove tracking dan bird watching tower di Nusa Ceningan telah mencapai 85% per Desember 2022. Pembangunan ini dilakukan bertujuan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan edukasi bagi masyarakat dan pengguna pariwisata di Kawasan konservasi perairan Nusa Penida.



**Gambar 1.A.21.** Progress pembangunan mangrove tracking di Nusa Ceningan, Nusa Penida

#### b. Pembangunan Surveillance Post di Batununggul, Nusa Penida.

Progress pembangunan ini per Desember 2022 telah mencapai 90%, pembangunan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah Provinsi Bali dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan KKP Nusa Penida dalam proses perlindungan kawasan dari kegiatan yang dapat merusak ekosistem perairan melalui kelompok POKMASWAS.



**Gambar 1.A.22.** Progress pembangunan surveillance post

## PAKET KEGIATAN 5

PT Duta Cipta Mandiri berkonsorsium dengan PT Cakra Buana Aghna, PT Ciriajasa Engineering, dan Yayasan Ekosistem Gili Indah/Gili Eco Trust

### a. Pelatihan Pokmaswas di Kawasan TWP Gili Matra

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10-12 Oktober 2022 di Lagoon Villa, Rust Gili Meno, Royal Reganis, kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, PSDKP, Perwakilan BKKPN Kupang Wilker TWP Gili Matra, Dinas Perikanan KLU, Penyuluh Perikanan, Mitra Pelaksana GP5, Perwakilan ICCTF, dan Anggota Pokmaswas, kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan terkait pentingnya peran Pokmaswas untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan.



Gambar 1.A.23. Pelatihan Pokmaswas di Kawasan TWP Gili Matra

### b. Pembangunan post pengawasan di Gili Trawangan

Progress pembangunan post pengawasan di Gili Trawangan telah mencapai 100% beserta dengan pengadaan fasilitas pendukung didalamnya. pembangunan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan BKKPN Kupang dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan KKP Gili Matra dalam proses perlindungan kawasan dari kegiatan yang dapat merusak ekosistem perairan melalui kelompok POKMASWAS.



Gambar 1.A.24. Progress pembangunan post pengawasan di Gili Trawangan

### c. Restorasi terumbu karang

Progress restorasi terumbu karang telah selesai dilakukan di bulan Desember 2022. Telah dilakukan penanaman 15.000 bibit karang, penanaman bibit karang menggunakan 1000 reef star dan 1500 fish dome, dan ini akan mencakup 5% dari luas terumbu karang yang terdegradasi di KKP Gili Matra.



**Gambar 1.A.24.** Proses pembuatan fishdome melibatkan perempuan di Gili Trawangan

PAKET  
KEGIATAN **6**  
SUCOFINDO

### a. Pembangunan infrastruktur Manara Pengawasan di Pulau Namo

Progress pembangunan menara pantau di Pulau Paserang dan Pulau Namo telah mencapai 100% pada akhir bulan Desember 2022.



**Gambar 1.A.25.** Progress pembangunan menara pantau di Pulau Namo

**b. Pengadaan peralatan untuk Pokmaswas dan Poklashar di Poto Tano.**

Kegiatan ini telah selesai dilakukan di bulan Desember 2022, sebagian besar peralatan pokmaswas dan kapal Pengawasan telah digunakan oleh 4 kelompok Pokmaswas.



**Gambar 1.A.26** Pengadaan Kapal Pokmaswas



**a. Studi tentang Pasar Tuna Internasional di Korea dan Jepang**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengunjungi pasar ikan internasional dan berdiskusi dengan otoritas perikanan mengenai pengelolaan pasar dan kebijakan terkait produk Tuna khususnya tuna dari Indonesia. Kajian ini juga akan mencari kemungkinan peningkatan kapasitas untuk “praktik terbaik” pengelola perikanan Indonesia dalam mengelola industri Tuna dan menjalankan pasar ikan internasional.



**Gambar 1.A.27.** Dokumentasi foto bersama kegiatan kunjungan di Korea dan Jepang

# B. BLUE FINANCE

## 1. Seminar Nasional Pendanaan Biru dan Peluncuran *Blue Finance Instruments Development Guideline*

Pada periode triwulan keempat tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kemenkomarves, serta pemangku kepentingan lainnya, telah selesai menyusun dokumen nasional konsolidasi untuk mendorong dan mempercepat pengembangan pembiayaan biru di Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi biru negara. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Seminar Nasional Pendanaan Biru dan meluncurkan panduan penyusunan instrumen keuangan biru yang disebut sebagai “*Blue Finance Instruments Development Guideline*”, untuk menyatukan dan menggabungkan berbagai pendekatan dan dokumen strategis yang telah dirilis dan lebih mempercepat, memandu, dan melaksanakan pengembangan Instrumen Pendanaan Biru untuk Indonesia.

Setelah penyusunan dokumen tersebut selesai, pada tanggal 1 November 2022 dilakukan *National Seminar on Blue Finance* dan peluncuran *Blue Finance Instruments Development Guideline* di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto (DH) 1-4, Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antarpemangku kepentingan nasional dalam pembiayaan ekonomi biru yang berkelanjutan, meluncurkan dokumen Indonesian Blue Finance Instruments Development Guideline, dan memperkenalkan rencana pembentukan *Advisory Committee* untuk Pendanaan Biru, termasuk peran dan keanggotaannya.



**Gambar 1.A.27.** Dokumentasi foto bersama kegiatan kunjungan di Korea dan Jepang



**Gambar 1.B.2.** Peluncuran *Blue Finance Instruments Development Guideline*

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas yang selanjutnya dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus memberikan pidato kunci serta meluncurkan dokumen *Blue Finance Instrument Developments Guideline*.

Setelah acara peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi oleh para narasumber. Narasumber utama, Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menyampaikan strategi penerapan pendanaan biru untuk mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru. Disampaikan bahwa program-program yang didanai SDGs bond masih belum bisa mendukung kebutuhan nasional khususnya sektor biru, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19. Harapannya melalui adanya instrument pendanaan biru dapat mendukung pendanaan sector kelautan dan perikanan yang dibutuhkan. Selain itu, disampaikan juga ringkasan isi dari dokumen *Blue Finance Instruments Development Guideline*.

Selanjutnya ADB Country Director untuk Indonesia menyampaikan kolaborasi, tantangan, dan potensi pendanaan biru di Indonesia untuk mengisi *gap* pendanaan dalam pengelolaan ekosistem pesisir. Direktur Pembiayaan Syariah Kemenkeu menyampaikan terkait instrumen pendanaan berkelanjutan yang pernah ada untuk mendukung program pembangunan Indonesia dan ekonomi biru. Disampaikan bahwa sudah terdapat beberapa contoh pendanaan pada sektor kelautan dan perikanan, namun pendanaan tersebut belum dapat dikatakan khusus “blue” karena belum ada blue framework. World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste menyampaikan *Innovative financing for sustainable development* melalui pengalaman pendanaan berkelanjutan yang dilakukan World Bank di beberapa negara serta di Indonesia sendiri. Terakhir Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diwakili oleh Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan menyampaikan kolaborasi aksi dalam mendukung implementasi blue finance di Indonesia, terutama di lingkup Kementerian.



**Gambar 1.B.3.** Cover Blue Finance Instruments Development Guideline



**Gambar 1.B.4.** Presentasi Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas

## 2. Blue Finance Policy Note

Selain Blue Finance Instruments Development Guideline, pada periode triwulan keempat tahun 2022 ICCTF-Bappenas dengan dukungan World Bank telah menyelesaikan penyusunan dokumen Indonesia Blue Finance Policy Note yang penyusunannya telah dilakukan sejak tahun 2020. Dokumen ini memuat hasil kajian tentang Komitmen Indonesia pada Blue Economy, Sustainable Financing, Challenges & Opportunities, Potential Blue Finance Mechanism, dan Blue Finance Roadmap. Pada akhir tahun 2022, dokumen tersebut telah selesai disusun dan dapat diunduh di website ICCTF.

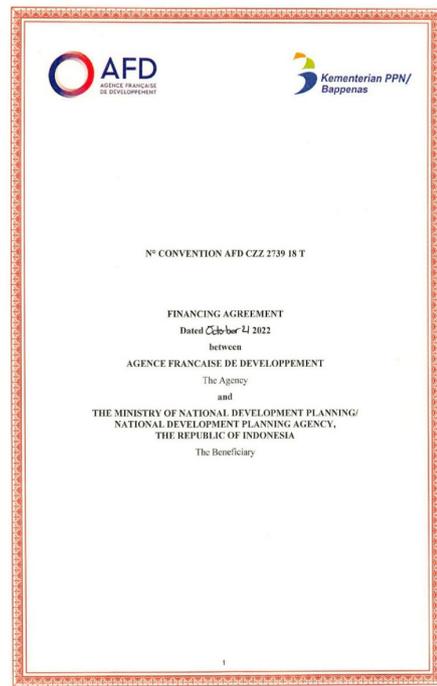


**Gambar 1.B.5.** Cover Indonesia Blue Finance Policy Note

## C. BLUE CARBON AFD

### 1. Penandatanganan Financing Agreement

*Financing Agreement* telah ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2022 oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Bappenas dan Country Director AFD Indonesia yang diketahui oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Pendanaan sebesar 620 ribu EURO tersebut akan diimplementasikan selama 36 bulan atau selama 3 tahun.



**Gambar 1.C.1.** Financing Agreement ICCTF-Bappenas dengan AFD

### 2. AFD Mission – Kunjungan Lokasi Potensi untuk Implementasi Kegiatan Karbon Biru ICCTF dan AFD di Raja Ampat

Pelaksanaan kunjungan lokasi Kampung Yensawai dilakukan pada tanggal 14 November 2022 yang dihadiri oleh 3 kelompok masyarakat serta champion dari Program COREMAP-CTI WB, Tim AFD, Tim ICCTF, serta perwakilan dari PKPSL-IPB. Tujuan pelaksanaan kunjungan ini dilakukan untuk mengkaji atau mengidentifikasi potensi karbon serta dukungan dari masyarakat terkait dengan pelestarian lingkungan di Raja Ampat, khususnya terhadap ekosistem lamun dan mangrove. Diskusi dibuka oleh Executive Director ICCTF yang menyampaikan terkait dengan tujuan dilakukannya kunjungan serta memperkenalkan kelompok masyarakat serta kegiatan kelompok di Kampung Yensawai kepada Tim AFD.



**Gambar 1.C.2.** Foto Bersama di titik Rehabilitasi Mangrove COREMAP-CTI WB

Kelompok pertama yaitu Kelompok Andoi terdiri dari 20 anggota yang kebanyakan dari anak muda mudi yang tinggal di Kampung Yensawai. Focus kegiatan kelompok ini adalah melakukan rehabilitasi lamun yang didampingi oleh PKPSL IPB yang memberikan pelatihan terkait dengan metode rehabilitasi lamun.

Kelompok kedua yaitu Korbon memiliki anggota kelompok sekitar 20 orang dan terdiri dari ibu-ibu di Kampung Yensawai. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok korbon adalah rehabilitasi mangrove dengan beberapa metode yang telah dicoba oleh kelompok dalam merehabilitasi mangrove di Kampung Yensawai. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan metode “Korbon” yang telah digunakan sesuai dengan ide dari salah satu masyarakat di Kampung Yensawai. Kelompok ini juga melakukan monitoring terhadap hasil rehabilitasi mangrove yang dilakukan. Kelompok terakhir yaitu Kelompok Terumbu Karang terdiri dari 20 anggota kelompok pemuda di Kampung Yensawai yang berfokus pada

kegiatan penyadartahuan serta rehabilitasi dan monitoring hasil rehabilitasi terumbu karang. Metode rehabilitasi yang dilakukan dengan menggunakan pipa paralon. Selain kegiatan rehabilitasi terumbu karang, kelompok ini juga rutin melakukan kegiatan peyadartahuan untuk wisatawan yang berkunjung ke Kampung Yensawai. Melalui diskusi yang telah dilakukan, masyarakat kampung Yensawai akan siap mendukung project terkait dengan karbon biru yang akan dilakukan.

### **3. Sosialisasi Program Support for The Integration of Blue Carbon Ecosystems in Indonesia's Biodiversity and Climate Policies di Manado, Sulawesi Utara**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7-11 Desember 2022. Tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan program yang akan dilakukan ICCTF-Bappenas kepada *stakeholders* setempat serta meminta masukan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan di Likupang, Sulawesi Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Utara, staff dari Bappeda Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, serta Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi Universitas Sam Ratulangi, dan pengusaha setempat.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Utara tahun 2020, Potensi Ekosistem Karbon Biru di Minahasa Utara merupakan yang terbesar di Sulut. Mangrove di Kabupaten Minahasa Utara merupakan yang terluas dengan luas 4.992 Ha, disusul Kabupaten Minahasa dengan luas 1.466 Ha. Lamun di Kabupaten Minahasa Utara merupakan yang terluas kedua dengan luas 2.256 Ha setelah Kab. Kepulauan Sangihe dengan luas 2.500 Ha. Selain



**Gambar 1.C.3.** Sesi Diskusi dengan masyarakat Kampung Yensawai

itu, luas terumbu karang Kabupaten Minahasa Utara merupakan yang terluas, yaitu 8.517 Ha.

Kadis KP Kab. Minahasa Utara akan menjamin masyarakat di Minut akan menerima project ini

Untuk policy terkait karbon biru akan disusun oleh pemerintah pusat yang nantinya akan diturunkan ke level pemda. DKP Minahasa Utara menyatakan bahwa perlu adanya kebijakan di level daerah dan pusat untuk mengatasi konflik regulasi, khususnya untuk ekosistem mangrove yang masih terjadi perdebatan antara KLHK dan KKP. Terdapat satu permasalahan tercemarnya ekosistem pesisir di Minut adalah karena keberadaan tambang, sehingga perlu penelitian dan perbaikan ekosistem agar daya dukung terhadap aktivitas tersebut lebih baik

Terdapat kegiatan penelitian karbon biru pada ekosistem lamun di Minahasa Utara oleh YAPEKA di Likupang Barat, Bulutui, Bahoi, Tarabitan, dan Gangga, bekerja sama dengan mahasiswa IPB University. Sampel lamun sudah berproses di lab untuk c-organik, namun isotop masih terkendala karena hanya dapat dilakukan di lab BATAN yang masih dalam proses penyatuan dengan BRIN.

Nilai ekonomi kabupaten Minut masih bertumpu pada sektor pariwisata, perlu tata ruang wilayah dan zonasi yang lebih baik.



**Gambar 1.C.4.** Sesi Diskusi dengan Kepala Dinas KP Prov. Sulawesi Utara (kiri) dan Kab. Minahasa Utara (kanan)

Akademisi dari Universitas Sam Ratulangi menyatakan bahwa keterbatasan data ekosistem karbon biru dan perhitungan karbon di Minahasa Utara perlu diatasi. Perhitungan luas lamun bisa menggunakan drone. Terkait dengan metodologi survey masyarakat bisa dilibatkan dalam penelitian karbon biru yaitu saat pengambilan sampel lamun dan substrat karena masyarakat sekitar memiliki pengalaman lebih baik di lokasi dan lebih mengetahui medan yang akan dilalui saat mengambil sample. Hal ini dapat meningkatkan safety saat penelitian dan juga meningkatkan persentase pelibatan masyarakat sekitar.

Bappeda mengharapkan potensi karbon biru yang ada di Sulawesi Utara dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehubungan telah adanya Nilai Ekonomi Karbon sesuai dengan Perpres no 98 tahun 2021. Bappeda mengeluhkan, adanya Kawasan Ekonomi Khusus Likupang ternyata

belum berpengaruh besar terhadap alokasi anggaran untuk Sulut terhadap potensi ekosistem yang ada, sehingga pendapatan daerah perlu ditingkatkan. Ada contoh di Kalimantan terkait perdagangan karbon di gambut yang pada akhirnya menjadi dana segar untuk daerah. Income dari ekosistem yang dijaga oleh masyarakat dan pemda sampai saat ini belum dirasakan.

Pihak swasta juga memberikan masukan, perhitungan karbon biru perlu baseline, serta Monitoring, Reporting, dan Verification yang kuat, sesuai dengan salah satu output project ini sehingga dapat memperkuat pasar Indonesia dalam carbon trading suatu saat nanti. Pengalaman dari beberapa carbon trading swasta (terrestrial) terdapat berbagai macam masalah, yaitu terkait data yang tidak kredibel dan kurangnya komitmen dalam menjaga ekosistem penyerap karbon (untuk hal ini terrestrial).



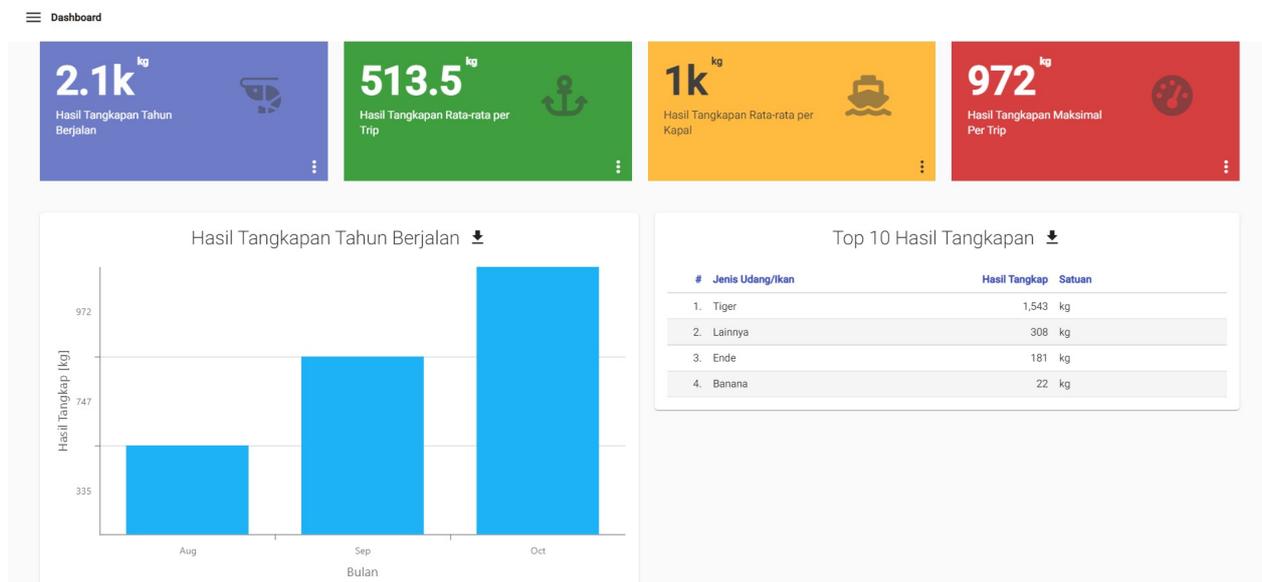
**Gambar 1.C.5.** Foto Bersama

## 1. Pengembangan Sistem Monitoring Penangkapan Udang di Laut Aru-Arafura

Pembangunan aplikasi sistem pelaporan dan monitoring udang laut Aru-Arafura ini telah diluncurkan dengan nama <https://suaralestari.info/>. Aplikasi tersebut telah disosialisasikan dalam FGD di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2022 dan kegiatan workshop di Ambon pada tanggal 8 November 2022 bersama perwakilan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Penangkapan Udang yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI), BP3 Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Stasiun PSDKP Ambon KKP, Bappeda Provinsi Maluku, PPN Tual KKP, dan BRIN.



Gambar 1.D.2. Sosialisasi Sistem Monitoring di Ambon



Gambar 1.D.1. Tampilan <https://suaralestari.info/>

Aplikasi tersebut memungkinkan para pelaku usaha perikanan udang di Laut Aru-Arafura untuk melakukan pendataan hasil tangkapan lebih efisien dan transparan, sehingga proses pelaporan tangkapan kepada pemerintah dapat dilakukan lebih mudah. Penggunaan aplikasi juga dapat bermanfaat bagi pelaku usaha udang untuk memonitor hasil tangkapan agar sesuai dengan batas tangkapan untuk aktivitas perikanan udang yang berkelanjutan, serta untuk mengetahui performa tangkapan untuk kepentingan inovasi dari pelaku usaha. Namun, masih terdapat berbagai tantangan untuk input data tangkapan di lapangan, mengingat kondisi lapangan di tengah laut yang dinamis.

Agar hasil kajian dan penggunaan aplikasi dapat bermanfaat secara efektif, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan meliputi:

- Perlu komitmen dan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pendataan dan pelaporan. Sebagai jaminan keberlanjutan stok ikan, kunci sukses implementasi sistem pelaporan dan monitoring produksi perikanan sangat tergantung pada proses pendataan dan pelaporan yang berlangsung secara konsisten.
- Perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini untuk mendukung proses pendataan dan pelaporan, termasuk penggalangan data dari stakeholder.
- Sistem Pelaporan dan Monitoring Udang yang dikembangkan dalam aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengusaha udang dan menjadikan contoh untuk pengelolaan WPP yang bisa direplikasi di WPP lain atau komoditas perikanan lain.

Penggunaan *Database* untuk aplikasi monitoring udang menggunakan *MySQL* dengan akses *cloud* dan berbayar. *Cloud database* sangat cocok untuk mengembangkan aplikasi tanpa terganggu dengan masalah terkait infrastruktur. Oleh karena itu, perlu penganggaran khusus untuk penyewaan *cloud* dalam penggunaan aplikasi tersebut.

## **2. Kajian Wilayah Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia Timur**

Beragam potensi sektor kelautan dan perikanan secara normatif dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pesisir

mengingat besarnya potensi sumberdaya alam yang ada. Potensi sektor kelautan dan perikanan akan lebih berdampak luas jika didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dimana pembangunan infrastruktur penunjang sektor perikanan dan kelautan seharusnya mengarah pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan terintegrasi.

Untuk menjawab isu konektivitas, Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF melakukan analisis spasial untuk melihat konektivitas antara antar pulau dan antar sektor, serta Infrastruktur Pendukung Industri sektor Kelautan dan Perikanan di Wilayah Indonesia Timur. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan dokumen hasil kajian konektivitas sebagai persiapan perencanaan program pemerintah selanjutnya. Untuk itu ICCTF melakukan kajian untuk perencanaan wilayah untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Indonesia Timur. Aktivitas yang dilakukan dalam kajian tersebut meliputi:

- 1) Melakukan studi literatur dan data sekunder untuk melihat pusat pertumbuhan ekonomi dan potensi pengembangan berbasis sumberdaya alam di Indonesia Timur;
- 2) Melakukan analisa dampak keberadaan infrastruktur terhadap pusat pertumbuhan dan potensi ekonomi serta konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi; dan
- 3) Menyusun peta spasial konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah ekosistem pesisir prioritas;

Kajian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dimulai dari Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022. Hasil kajian terhadap potensi sumber daya dan konektivitas antar pelabuhan yang ada di wilayah pesisir dan kelautan Wilayah Indonesia Timur menunjukkan adanya missing-link transportasi logistik industri, perikanan, dan barang umum yang mengangkut bahan mentah maupun olahan dari berbagai tempat di wilayah tersebut untuk dibawa ke pasar global. Selain karena terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM di kota-kota pelabuhan, pola perdagangan dan pelayaran saat ini ternyata masih tergantung pada kapasitas pelabuhan Surabaya, Makassar, maupun Bitung. Oleh

karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif untuk mengembangkan kawasan ekonomi berbasis konektivitas Pelabuhan yang menghubungkan antar kota-pelabuhan tersebut kepada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia di wilayah tersebut (ALKI III) melalui tol laut.

Konektivitas ini akan mengatasi missing link antara potensi kelautan dengan infrastrukturnya, dapat juga untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta untuk menjalankan berbagai kepentingan nasional yang strategis seperti pemerintahan, keamanan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan komunikasi. Konektivitas yang efektif dan efisien di internal wilayah perairan Maluku-Papua ini akan mampu mendorong tumbuhnya hilirisasi industri yang berorientasi ekspor dan tumbuhnya pariwisata dan ekonomi jasa perkotaan dengan pasar global. Oleh karena itu, perlu percontohan pengembangan kawasan ekonomi berbasis konektivitas antar pelabuhan.

Dalam membangun pelabuhan hub di wilayah perairan Maluku-Papua maka pasar global dapat didekatkan dan memicu tumbuhnya hilirisasi industri. Pengembangan jasa logistik pelabuhan kapal niaga, kapal perintis, dan kapal pesiar perlu direncanakan dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah pelabuhan

laut berstandar internasional dan mampu menjadi hub lalu lintas navigasi internasional di Wilayah Perairan Maluku dan Papua ini. Namun dalam pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas kepelabuhanan penting untuk mempertimbangkan keberadaan zona konservasi laut yang merupakan aset biodiversitas yang menyimpan potensi keekonomian juga. Pengaturan zona ekonomi

kepelabuhanan harus mempertimbangkan neraca sumber daya pesisir dan kelautan dan dengan skala pelayanan tertentu dan teknologi rendah karbon dan ramah lingkungan. Penerapan prinsip green port city yang memprioritaskan penggunaan energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan efisiensi operasional kepelabuhanan juga menjadi faktor penting dalam pengembangannya nanti termasuk pemisahan antara logistik untuk pengembangan kepelabuhanan dengan konservasi untuk pengembangan kawasan wisata bahari.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengembangan budaya maritim, serta penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Bagian ini bisa dimulai dari penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan menengah dan tinggi yang diwujudkan dengan pemberian beasiswa sekolah teknis maritim sampai dengan peningkatan kapasitas riset dan pengembangan. Di samping itu, diperlukan juga strategi untuk meningkatkan keseimbangan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan antarwilayah khususnya di wilayah kecamatan-kecamatan pesisir Kepulauan Maluku dan Papua. Dengan demikian ke depannya memang diperlukan keterpaduan perencanaan yang lebih detail lintas sektor, multi aktor, dan antar wilayah demi pengembangan wilayah pesisir dan kelautan di Maluku dan Papua. Studi pada level tapak dengan metoda studi kasus sangat direkomendasikan, khususnya pada kawasan pelabuhan Ambon yang akan berpotensi sebagai hub pelabuhan di wilayah Maluku-Papua untuk melayani pasar global.

### **3. Kajian Pengembangan Wisata Bahari di Gili Kondo, Nusa Tenggara Barat**

Salah satu pemanfaatan yang dilakukan di kawasan konservasi adalah pariwisata, namun pariwisata yang berkembang saat ini adalah pariwisata massal atau pariwisata yang berlebihan (overtourism) yang berdampak pada lingkungan dan mengancam kelestarian sumberdaya alam. Dampak negatif dari kelebihan wisata tersebut dapat direduksi dengan memaksimalkan potensi alternatif destinasi wisata bahari. Namun, pengembangan wisata bahari alternatif yang dibangun diharuskan memperhatikan berbagai aspek agar tidak terjadi overtourism atau dampak buruk lainnya dari kegiatan wisata yang tidak bertanggung jawab.

Melihat permasalahan yang ada dan potensi yang dapat dikembangkan, Kementerian PPN/ Bappenas dan ICCTF kemudian berinisiatif untuk melakukan satu kegiatan perencanaan kawasan konservasi perairan untuk pengembangan wisata bahari. Kajian tersebut dilakukan di kawasan Gili Kondo, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai

bagian dari antisipasi overtourism di kawasan wisata di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Kajian tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan pada Oktober-Desember 2022. Kajian pengembangan wisata tersebut dilakukan melalui identifikasi permasalahan untuk memperoleh masukan dalam manajemen operasional, mekanisme pengelolaan wisata minat khusus, integrasi wisata bahari, kelayakan dan kesiapan Kawasan Konservasi untuk pengembangan wisata minat khusus atau titik singgah kapal wisata.

Dalam kajian awal untuk pengembangan wisata di Gili Kondo, Provinsi NTB, terindikasi bahwa aktivasi Teluk Alas menjadi kunci untuk mengaktifkan kegiatan wisata bahari setempat, melalui kegiatan kapal wisata Phinisi. Maka dari itu, rekomendasi dari kajian ini adalah menyediakan jalur wisata untuk memasuki Teluk Alas hingga Gili Kondo dengan memperhatikan pembangunan rambu-rambu perjalanan kapal di kawasan tersebut. Untuk kegiatan wisata bahari yang spesifik seperti kegiatan selam, kajian turut merekomendasikan berbagai kegiatan penyediaan fasilitas wisata setempat, seperti pembangunan mooring buoy, identifikasi dive spot, serta penguatan SDM dan operator selam.

#### **4. Dukungan Pengembangan Kebijakan Budidaya Udang Berkelanjutan di Indonesia**

ICCTF melakukan kajian untuk menggambarkan kondisi terkini produksi benih udang, udang konsumsi dan pakan beserta rantai pasok dan rantai nilainya, serta potensi gangguan/ancaman terganggunya produksi udang di level nasional. Kajian ini dilakukan mengingat kebutuhan untuk menyusun suatu kerangka acuan dan kajian awal (*preliminary assessment*) yang dapat dijadikan acuan pada saat implementasi proyek perikanan udang berkelanjutan yang ramah lingkungan serta bebas alih fungsi lahan, untuk diajukan kepada GEF-ADB. Kajian ini dapat mengidentifikasi kebijakan yang dibutuhkan dan mengelaborasi arahan-arahan terkait dengan pembuatan *Grand Design* kebijakan untuk perikanan udang di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian, potensi gangguan dalam pengembangan produksi udang nasional berfokus pada kompetisi untuk penyediaan

pakan dan perubahan iklim. Rekomendasi pada kajian ini adalah memaksimalkan strategi yang dapat menjawab potensi gangguan untuk pengembangan udang, antara lain:

- **Strategi Mitigasi Perubahan Iklim untuk Pengembangan Budidaya Udang**

Perubahan iklim dapat memunculkan berbagai gangguan dari pengasaman air laut, perubahan suhu air laut, dan perubahan pola curah hujan yang dapat merubah pH air dan menimbulkan stress untuk udang. Sebagai langkah untuk meminimalisir dampak dari gangguan tersebut, aktivitas budidaya perlu menggunakan fasilitas water treatment. Maka, strategi untuk memaksimalkan water treatment, termasuk pengaturan keseimbangan biaya produksi atas penggunaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mitigasi perubahan iklim.

Kondisi perubahan iklim yang mencemari perairan juga dapat mengganggu pembenihan udang karena lokasi pembenihan di Indonesia banyak yang berlokasi di wilayah dengan perairan yang tercemar. Strategi pengembangan benih udang vaname yang bisa dilakukan yaitu dengan mengadakan hatchery di beberapa wilayah yang melakukan produksi udang vaname. Hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi biaya pokok produksi dalam benih udang vaname. Selain itu, dengan pengembangan benih udang vaname yang tahan terhadap penyakit dan memiliki pertumbuhan yang cepat. Selain itu, untuk meniasati tersendatnya stok untuk budidaya udang dalam mengikuti tren pasar, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai perlunya pembuatan system stock/lumbung produk udang yang mampu menyimpan udang dalam bentuk produk yang mengikuti trend pasar dalam waktu yang lama.

- **Strategi pengembangan pakan untuk budidaya udang**

Untuk meniasati isu pakan dalam budidaya udang, arahan strategi yang dapat dilakukan pada ekosistem pesisir untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan penambahan produksi bahan baku dengan

melakukan kegiatan budidaya rumput laut (*Ulva sp.*) dan jenis kerang-kerangan. *Ulva sp.* termasuk kedalam jenis rumput laut yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku karena memiliki tingkat karagenan yang rendah dan memiliki nilai protein yang bisa di serap oleh ikan maupun udang. Rumput laut dapat digunakan sebagai penurun penyebab perubahan iklim. Rumput laut memiliki sifat sebagai penyerap bahan-bahan organik seperti karbon penyebab emisi gas efek rumah kaca. Oleh karena itu, dengan melakukan budidaya *Ulva sp.* dapat meningkatkan produksi bahan baku pada pakan dan menurunkan kadar karbon di perairan.

- K erang hijau (*Perna viridis*) termasuk kedalam salah satu hewan yang dapat menyerap bahan-bahan anorganik pada perairan seperti logam berat. Kerang hijau memiliki kemampuan untuk *filter feeder* atau *deposit feeder*. Deposit feeder adalah biota laut yang mendapatkan nutrisi dengan cara memakan semua partikel yang mengendap di dasar laut. Daging Kerang hijau dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan dikarenakan memiliki protein yang cukup tinggi, selain itu pada penelitian yang sudah dilakukan cangkang ikan hijau dapat

digunakan sebagai bahan keramik. Strategi budidaya *Ulva sp.* dan kerang hijau pada ekosistem pesisir dapat berpengaruh terhadap produksi pakan di Indonesia dan pencegahan perubahan iklim yang berkelanjutan.

Lebih lanjut lagi, arahan strategi yang dibutuhkan untuk budidaya udang nasional membutuhkan perspektif yang luas untuk manajemen lingkungan tambak udang. arahan strategi yang perlu dilakukan untuk manajemen lingkungan tambak udang adalah reboisasi, efisiensi penggunaan bahan kimia dan biologi air, pembuatan IPAL dan atau *Water Conditioning System* dengan pendekatan kawasan serta penggunaan pakan yang rendah kadar protein. Pelaku budidaya udang juga perlu penerapkan cara budidaya ikan yang baik, sementara pemangku kepentingan perlu mendorong pengolah untuk memberikan dukungan kepada middleman, petambak, dan pembenihan terkait dengan produksi udang yang berkelanjutan dan penanganan produk udang yang baik. Untuk mengatasi isu alih fungsi lahan, perlu dilakukan pengikatan lokasi tambak dalam satu kawasan pengembangan dan produksi dalam satu kesatuan pengelolaan *Ecosystem Aquaculture Approach* yang bernilai strategis nasional untuk ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan nasional yang disahkan dalam regulasi dan dasar hukum yang jelas.

# E | Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)

## a. Pembahasan Cost Tab Hibah Towards Sustainable and Conversion – Free Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2022 bertempat di Hotel Neo, Bogor. Agenda dari pertemuan ini adalah pembahasan Cost Tab Hibah Towards Sustainable and Conversion – Free Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME). Berikut adalah beberapa poin penting hasil dari pertemuan ini:

- Hibah ini terdiri dari 5 komponen, dimana Indonesia akan bekerja pada Komponen 1, 2, 4, dan 5.
- Hibah tersebut akan dikerjakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Menambah “*Spatial Planning Shrimp Aquaculture*” pada komponen *Gap Analysis* untuk Output *Grand Strategy* kebijakan budidaya udang Output 1.1.1 (Halaman 1)
- Menghapus berbagai nama asosiasi seperti GPMT, MAI, shrimp club Indonesia, dsb, sehingga bisa di *merge* sebagai “*other key stakeholder*”
- Menambahkan “*co-lead with Bappenas*” pada halaman 6 untuk output training (2.1.1)
- Menghapus INDOGAP pada halaman 6 karena sudah bisa terkandung dalam national feed certification systems, dan project bisa tetap terbuka pada system sertifikasi yang lain. Menghilangkan konten STELINA pada halaman 7 pada output 2.1.3, mengingat kurang relevan.
- Budget telah direvisi dan akan dikirimkan kepada tim ADB untuk selanjutnya dibahas bersama.



**Gambar 1.E.1.** Diskusi bersama pembahasan Hibah Towards Sustainable and Conversion – Free Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME)

# 2

## Undangan Narasumber, Program Strategis, Potensi Kerja Sama, dan Penggalangan Dana (*fundraising*)

### a. Road to Ocean 20 Workshop: Workshop on Blue Carbon of Seagrass Ecosystem and Livelihood

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober 2022 di Labuan Bajo. Workshop Seagrass Blue Carbon Ecosystem and Livelihood pada hari pertama ini berfokus pada tema seagrass mapping and research. Pada sesi diskusi, Executive Director ICCTF memandu *open facilitated discussion* untuk mendiskusikan kebutuhan masa depan dan langkah selanjutnya dalam pemetaan lamun di Indonesia. Isu pertama mengenai padang lamun di Indonesia adalah seberapa besar sebenarnya luasan padang lamun di Indonesia dan apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan angka tersebut. Berbeda dengan mangrove, mengumpulkan data padang lamun memiliki tantangan tersendiri karena berada di bawah air. Pembuat kebijakan memerlukan akurasi data yang baik untuk menentukan kebijakan. Dibutuhkan juga spesifikasi output dan outcome yang baik dari kegiatan pemetaan padang lamun sehingga lebih memudahkan dalam mencari pendanaan.

Workshop hari kedua berfokus pada tema livelihood. Poin penting hasil dari diskusi tersebut adalah tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan dari perbedaan gender pada saat dilaksanakannya FGD-FGD mengenai livelihood di padang lamun. Pada kawasan yang dekat dengan daratan, masyarakat biasanya bergantian menjadi



**Gambar 2.A.1** Diskusi dipimpin oleh Executive Director ICCTF

petani di darat dari pembudidaya terutama pada saat musim hujan. Isu karbon biru di Indonesia pada umumnya masih berkutat pada *lack of scientific data, less attention of policy maker, dan common property issue*. Dibutuhkan kreativitas dari para pihak untuk menjawab tantangan yang ada meski dengan situasi kurangnya sumberdaya manusia saat ini dalam bidang karbon biru. Penting bagi para peneliti untuk menerjemahkan hasil penelitian yang ada kepada para pembuat kebijakan. Penting juga bagi instansi stakeholder dalam mengelola dan membuka data terkait padang lamun yang dimilikinya sehingga informasi yang ada dapat tersebar dengan baik.

## b. Integrated Coastal Management ICM Knowledge Forum PEMSEA Network of Local Governments

Pada tanggal 27 Oktober 2022, Executive Director ICCTF menjadi narasumber pada kegiatan Seminar dan Diskusi Integrated Coastal Management ICM Knowledge Forum PEMSEA Network of Local Governments di Tangerang, Banten yang dilaksanakan oleh PKSPL-IPB. Pada kesempatan ini disampaikan bahwa lebih dari 90% nelayan di Indonesia adalah nelayan skala kecil, namun 90% produk perikanan di Indonesia berasal dari nelayan berskala besar. Data tahun 2021, kontribusi sektor perikanan terhadap GDP Indonesia adalah sebesar 2,7%. Visi Indonesia 2045 mengatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki kontribusi sebesar 12,5% pada tahun 2045.

Terkait dengan pendanaan pembangunan Indonesia, diperlukan USD 1,64 T untuk mendanai 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, namun APBN hanya dapat mendanai sekitar 20-25%, sehingga diperlukan pendanaan inovatif. Salah satu pendanaan inovatif untuk mengisi 75-80% gap tersebut untuk sektor kelautan dan perikanan adalah Blue Finance. Indonesia telah memiliki kebijakan untuk mendukung Blue Finance, yaitu Blue Economy Development Framework, Blue Finance Strategic Document, Blue Finance Policy Note, SDGs Government Securities Framework, dan akan diluncurkan Blue Finance Instruments Development Guideline.

## c. Diskusi dengan Ibu Elshinta, Ketua Yayasan Laut Lestari Indonesia

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022 bertempat di Ruang Rapat ICCTF. Agenda pertemuan ini adalah diskusi potensi kerjasama ICCTF dengan Yayasan Laut Lestari Indonesia (YLLI). Beberapa poin penting hasil daripertemuan ini, antara lain sebagai berikut:

- Target dari organisasi YLLI yaitu *Youth* dan Pulau – pulau perbatasan kecil.
- Campaign utama yang dilaksanakan berupa isu lingkungan khususnya laut di Indonesia melalui IMO bersama dengan Kemenkomarves.
- *Project* yang telah berjalan yaitu melakukan *Summer School* bersama dengan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, hal tersebut telah menghasilkan beberapa modul terkait Pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



**Gambar 2.B.1** Sesi Presentasi ICM Knowledge Forum PEMSEA Network of Local Governments



**Gambar 2.C.1.** Diskusi dengan Ketua Yayasan Laut Lestari Indonesia (YLLI)

- Saat ini tim YLLI akan fokus untuk mempersiapkan *Expertise*, *Capability* dan *Administration* sebagai syarat utama untuk *apply submission* mitra pelaksana project dari ICCTF.

#### d. Diskusi Kajian Awal Strategi Pengembangan Udang Nasional

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022 di ruang rapat ICCTF. Agenda dari pertemuan ini adalah pembahasan rencana konsultasi Kajian Awal Strategi Pengembangan Udang Nasional. Beberapa poin-poin penting hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Kajian awal ini sebagai entry point, tidak sampai ke tahap solusi.
- Perlu di list isu apa saja yang ada (sebaran pakan, benih, climate change, dll) serta gap analisisnya.
- Isu-isu yang ada diidentifikasi dari hulu ke hilir (*traceability*), dibungkus dalam isu region dan kewilayahan, ke dalam kajian awal.
- Dari dokumen Kajian Awal tersebut disusun KAK untuk menjawab isu-isu tersebut. Penyajiannya menjawab tantangan untuk pengembangan udang yang ideal di Indonesia.

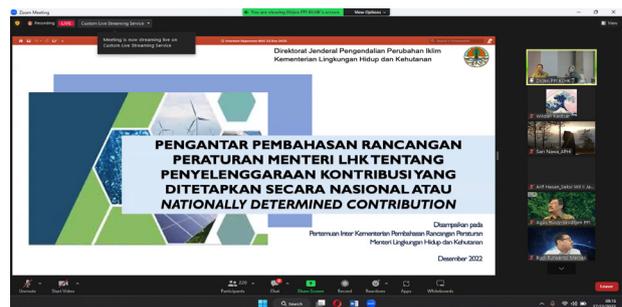


Gambar 2.D.1. Diskusi Kajian Awal Strategi Pengembangan Udang Nasional

#### e. Undangan Pertemuan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang NDC sebagai Tindak Lanjut Perpres No.98 Tahun 2021

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022 melalui aplikasi Zoom. Agenda dari pertemuan ini adalah konsultasi publik terhadap rancangan Peraturan Menteri LHK tentang NDC untuk menindaklanjuti Perpres No. 98 Tahun 2021. Beberapa poin-poin penting hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Pada bulan September tahun 2022 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dokumen *Enhanced* NDC dimana target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri sebesar 29% meningkat ke 31,89% dan target dengan dukungan internasional sebesar 41% meningkat ke 43,20%
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 telah disahkan Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi NEK sangat penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis market di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan



Gambar 2.E.1. Pemaparan oleh Dirjen PPI, KLHK

- Strategi implementasi NDC meliputi:
  1. Pengembangan kepemilikan dan komitmen;
  2. Pengembangan kapasitas;
  3. Penciptaan kondisi pemungkin;
  4. Penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi;
  5. Pengembangan dan penerapan kebijakan satu data Emisi GRK dan ketahanan iklim;
  6. Penyusunan kebijakan, rencana dan program;
  7. Penyusunan pedoman implementasi NDC;
  8. Pelaksanaan NDC;
  9. Pemantauan dan kaji ulang NDC.

- Dengan berlakunya Perpres No. 98 Tahun 2021 terdapat 5 peraturan yang dicabut, yaitu:
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan

Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumber daya Pengendalian Perubahan Iklim;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

# 3

## Komunikasi, *Outreach* dan Kemitraan

Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas. Pada tahun 2021 hingga di tahun 2022 ini, kegiatan komunikasi dan publikasi ICCTF juga diarahkan untuk mendukung implementasi Bappenas dalam konteks RPJMN serta monitoring ekosistem pesisir prioritas dan Rehabilitasi Terumbu Karang.

Kegiatan komunikasi ICCTF terbagi atas dua strategi yaitu komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi ini, eksistensi ICCTF sebagai satu-satunya lembaga perwalian dana perubahan iklim yang dimandatkan oleh pemerintah di Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dan diakui, baik oleh pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Komunikasi internal kepada seluruh staf ICCTF di semua level untuk meningkatkan manajemen pengetahuan seluruh staf tentang visi-misi ICCTF,

menginternalisasi nilai-nilai strategis organisasi, dan membangun solidaritas staf agar terbangun suatu budaya kerja positif di ICCTF.

Sedangkan untuk kegiatan komunikasi eksternal, ICCTF menekankan pada pengenalan visi-misi organisasi, peranan strategis organisasi, serta eksistensi dan fungsi dari pengembangan program - program ICCTF. Selain itu juga menyebarkan capaian serta pembelajaran program-program ICCTF yang layak untuk disebarluaskan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa. Upaya pengenalan dan penjangkauan publik ICCTF dilakukan secara intens dengan pola yang beragam dan target yang variatif. Pola komunikasi yang diterapkan secara umum tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan ekspose program - program ICCTF, tetapi juga dalam bentuk kunjungan ke lokasi program, pameran dan seminar, optimalisasi sosial media dan website ICCTF, serta peningkatan relasi dengan media melalui kegiatan *press conference*. Komunikasi lebih fokus pada komunikasi eksternal melalui penyelenggaraan kegiatan kick-off, seminar publik, serta pelatihan dan juga *Exit Strategy*.

### **a** Media Sosial

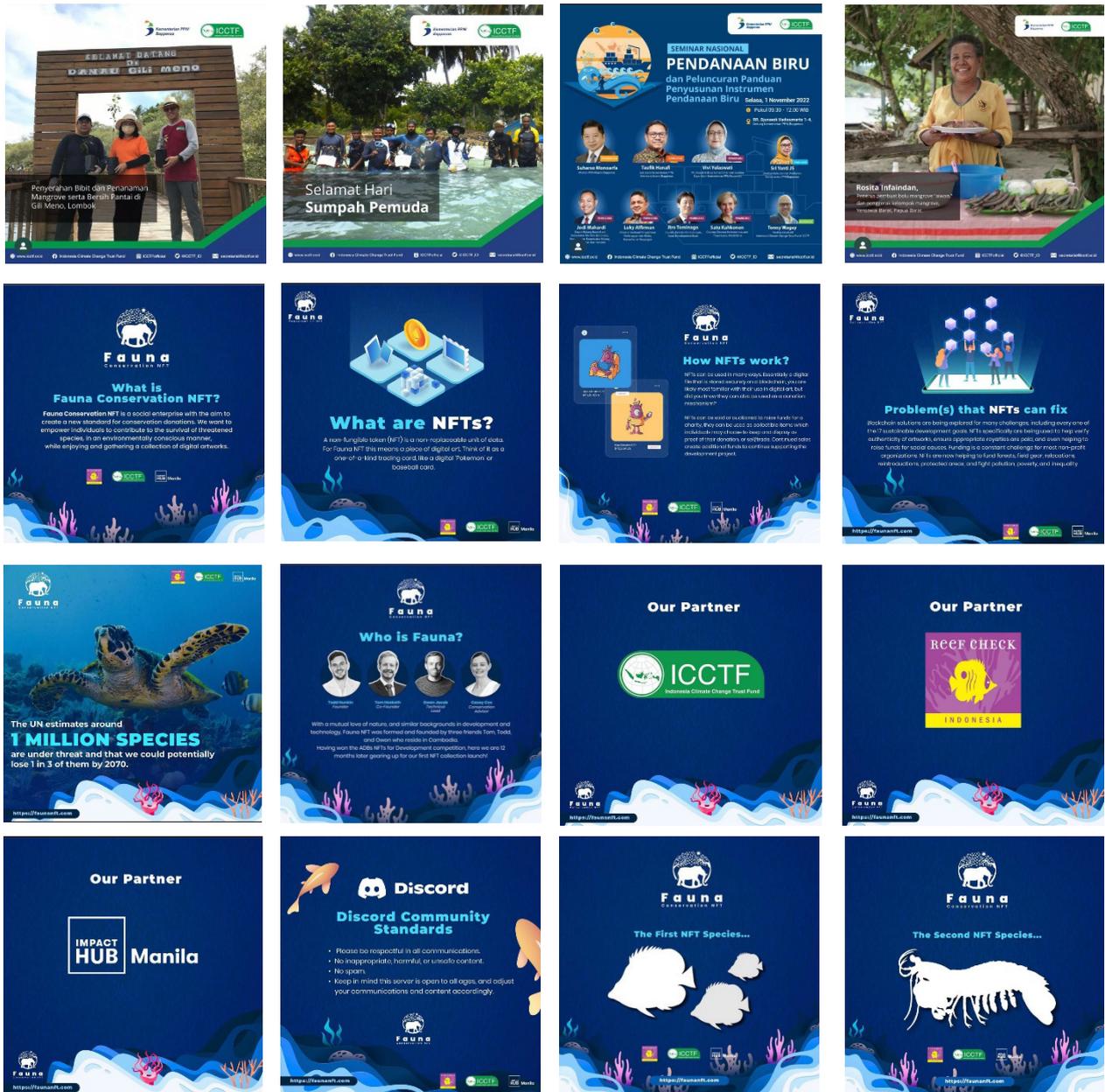
Pada triwulan keempat 2022 ini, ICCTF melakukan strategi pendekatan komunikasi digital karena dinilai lebih interaktif dan real time, melalui pengelolaan media sosial ICCTF yang terdiri atas Facebook (<https://www.facebook.com/IndonesiaClimateChangeTrustFund>); Twitter (@ICCTF\_ID); Instagram (@icctfofficial); Youtube (ICCTF Official) dan website ICCTF (<https://www.icctf.or.id/>). ICCTF berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia termasuk media sosial dengan memperbaharui penyebaran konten informasi dan foto - foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana di daerah. Portofolio pengelolaan media sosial ICCTF pada periode triwulan pertama terangkum pada Gambar dan Tabel di bawah. Adapun laporan *organic traffic* dari media sosial yang dikelola oleh ICCTF terangkum dalam infografis berikut.

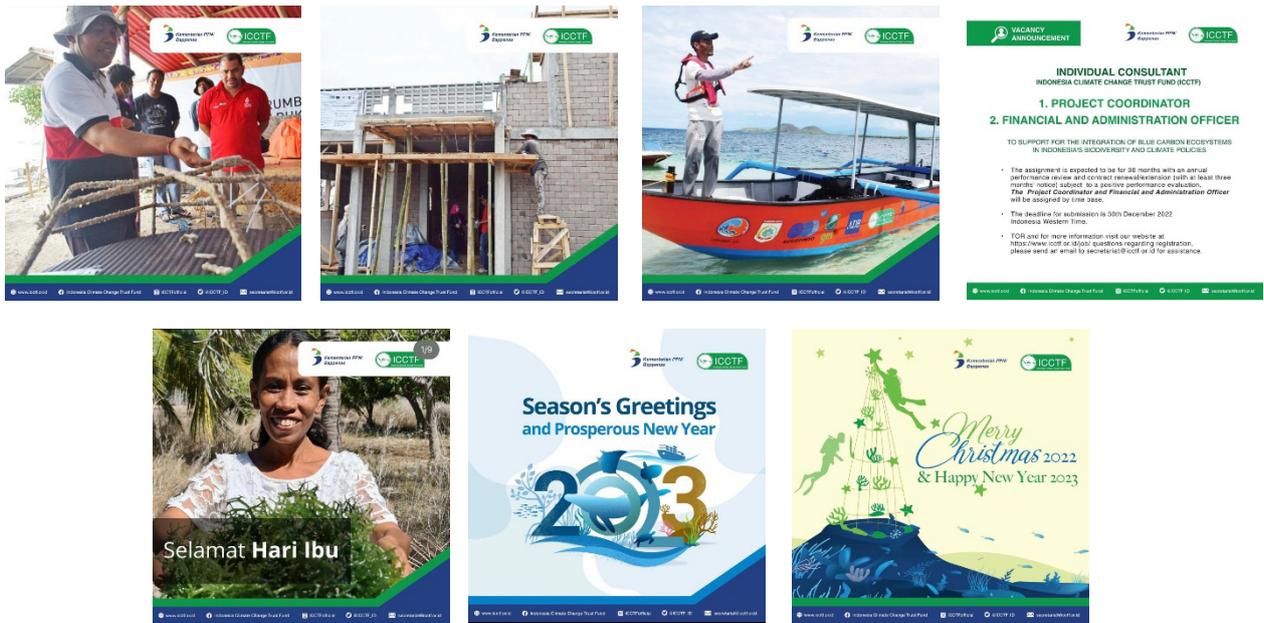
# JUMLAH PENGIKUT

Sampai dengan SEPTEMBER 2022

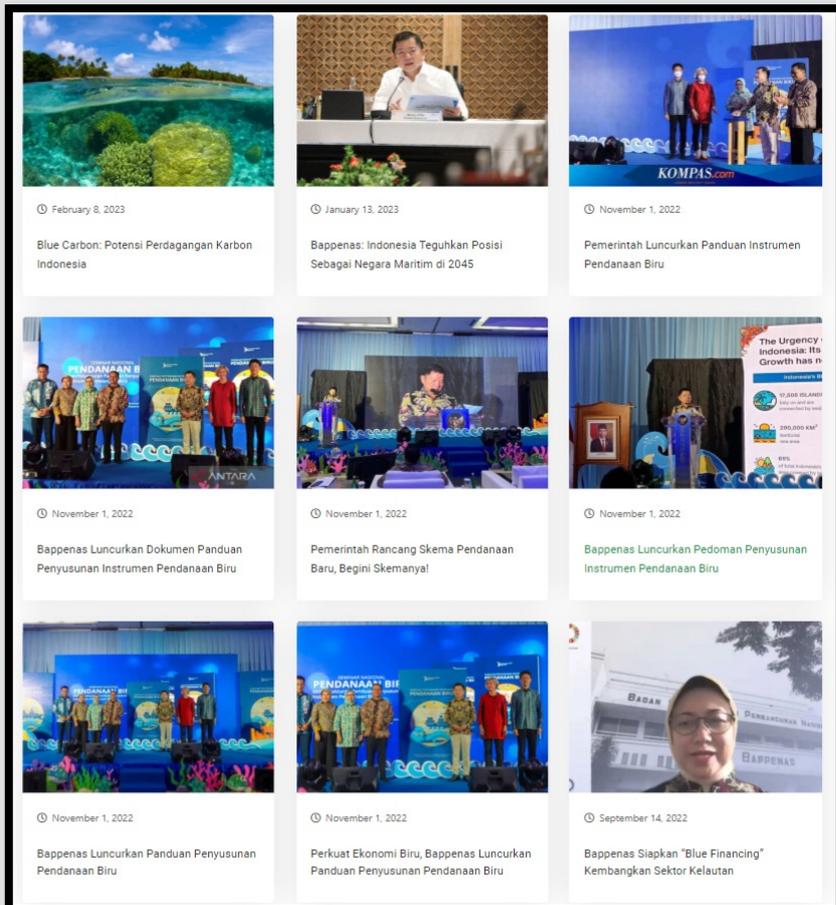


Gambar 3.A.1 Infografis Perkembangan Akun Sosial Media ICCTF: Facebook, Twitter dan Instagram pada kuartal 4 (Hingga Akhir bulan Desember) Tahun 2022.

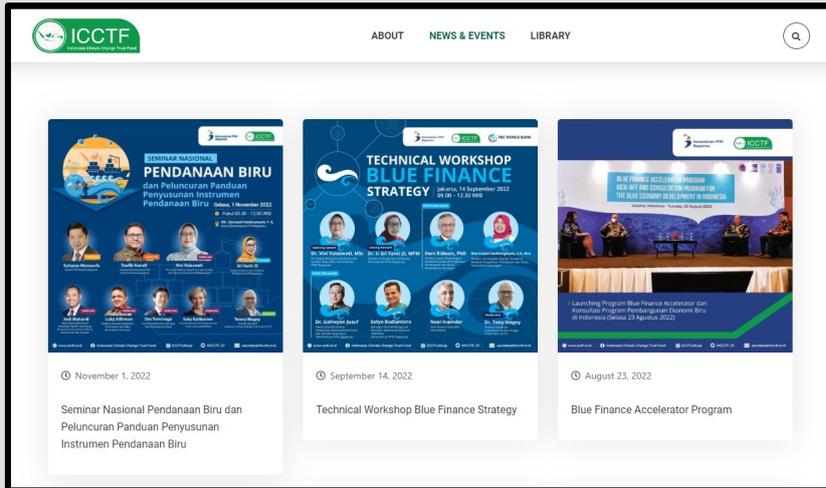




**Gambar 3.A.2** Tampilan Materi Publikasi untuk Konten Sosial Media ICCTF Kuartal 4 (Bulan Oktober, November dan Desember) Tahun 2022.



**Gambar 3.A.3** Tampilan pada halaman News Website Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 4 (Bulan Oktober, November, Desember) Tahun 2022.



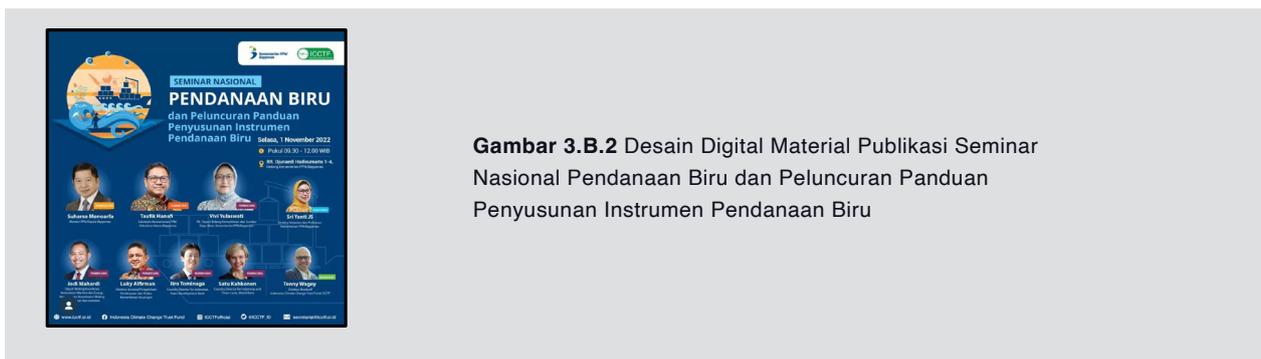
**Gambar 3.A.4** Tampilan pada halaman Event Website yang telah tayang di ICCTF News pada Kuartal 4 (Bulan Oktober, November, Desember) Tahun 2022.

**b** **Produksi Materi dan Produk Komunikasi**

Pada Kuartal keempat 2022 ini, Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan komunikasi massa secara digital. ICCTF bersama mitra pelaksana COREMAP–CTI Asian Development Bank dengan melakukan produksi materi komunikasi baik secara digital dalam bentuk cetak dan visual. Produksi media untuk mendukung kegiatan sekretariat, yaitu Kalender 2023 (Gambar 3.B.1); Desain Digital Material Publikasi Seminar Nasional Pendanaan Biru dan Peluncuran Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru (Gambar 3.B.2);



**Gambar 3.B.1** Cover depan dan belakang Kalender ICCTF 2023



**Gambar 3.B.2** Desain Digital Material Publikasi Seminar Nasional Pendanaan Biru dan Peluncuran Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru

## C Media Monitoring

Pada Kuartal 4 2022 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa baik cetak maupun online. Pada kuartal ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa yaitu Seminar Nasional Pendanaan Biru dan Peluncuran *Blue Finance Instruments Development Guideline*.

### Seminar Nasional Blue Finance

1	1 Nov	ANTARA	<b>Blue Economy to Prioritize environment Sustainability Bappenas</b>	<a href="https://en.antaranews.com/news/258021/blue-economy-to-prioritize-environmental-sustainability-bappenas">https://en.antaranews.com/news/258021/blue-economy-to-prioritize-environmental-sustainability-bappenas</a>
2	1 Nov	ANTARA	<b>Bappenas Paparkan Poin Penting Dalam Upaya Wujudkan Pendanaan Biru</b>	<a href="https://www.antaranews.com/berita/3216049/bappenas-paparkan-poin-penting-dalam-upaya-wujudkan-pendanaan-biru">https://www.antaranews.com/berita/3216049/bappenas-paparkan-poin-penting-dalam-upaya-wujudkan-pendanaan-biru</a>
3	1 Nov	ANTARA	<b>Bappenas Rekomendasikan Instrumen Yang Cocok Dalam Pendanaan Biru</b>	<a href="https://www.antaranews.com/berita/3216381/bappenas-rekomendasikan-instrumen-yang-cocok-dalam-pendanaan-biru">https://www.antaranews.com/berita/3216381/bappenas-rekomendasikan-instrumen-yang-cocok-dalam-pendanaan-biru</a>
4	1 Nov	ANTARA	<b>Bappenas Luncurkan Dokumen Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru</b>	<a href="https://www.antaranews.com/berita/3214969/bappenas-luncurkan-dokumen-panduan-penyusunan-instrumen-pendanaan-biru">https://www.antaranews.com/berita/3214969/bappenas-luncurkan-dokumen-panduan-penyusunan-instrumen-pendanaan-biru</a>
5	1 Nov	ANTARA	<b>Bappenas: Ekonomi Biru Prioritaskan Aspek Keberlanjutan Lingkungan</b>	<a href="https://www.antaranews.com/berita/3215633/bappenas-ekonomi-biru-prioritaskan-aspek-keberlanjutan-lingkungan">https://www.antaranews.com/berita/3215633/bappenas-ekonomi-biru-prioritaskan-aspek-keberlanjutan-lingkungan</a>
6	1 Nov	ANTARA	<b>Menteri PPN: Ekonomi Biru Jadi Landasan Strategi Transformasi Ekonomi</b>	<a href="https://www.antaranews.com/berita/3215293/menteri-ppn-ekonomi-biru-jadi-landasan-strategi-transformasi-ekonomi">https://www.antaranews.com/berita/3215293/menteri-ppn-ekonomi-biru-jadi-landasan-strategi-transformasi-ekonomi</a>
7	1 Nov	Bisnis Indonesia	<b>Bappenas Terbitkan Panduan Penyusunan Pendanaan Biru Untuk Pembangunan Ekonomi</b>	<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1651755/bappenas-terbitkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru-untuk-pembangunan-ekonomi-ri">https://bisnis.tempo.co/read/1651755/bappenas-terbitkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru-untuk-pembangunan-ekonomi-ri</a>
8	1 Nov	Tempo	<b>Kepala Bappenas Konsep Ekonomi Biru Jadi Solusi Tantangan Sistem Perekonomian Yang Eksploitatif</b>	<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1651819/kepala-bappenas-konsep-ekonomi-biru-jadi-solusi-tantangan-sistem-perekonomian-yang-eksploitatif">https://bisnis.tempo.co/read/1651819/kepala-bappenas-konsep-ekonomi-biru-jadi-solusi-tantangan-sistem-perekonomian-yang-eksploitatif</a>

9	1 Nov	Kompas.com	<b>Pemerintah Luncurkan Panduan Instrumen Pendaan Biru</b>	<a href="https://money.kompas.com/read/2022/11/01/203100926/pemerintah-luncurkan-panduan-instrumen-pendanaan-biru">https://money.kompas.com/read/2022/11/01/203100926/pemerintah-luncurkan-panduan-instrumen-pendanaan-biru</a>
10	1 Nov	Kompas.com	<b>Kepala Bappenas: Negara Bisa Raup 2 triliun dollar US Tiap Tahun Dari Kekayaan Laut</b>	<a href="https://money.kompas.com/read/2022/11/01/192000026/kepala-bappenas-negara-bisa-raup-2-triliun-dollar-as-tiap-tahun-dari-kekayaan">https://money.kompas.com/read/2022/11/01/192000026/kepala-bappenas-negara-bisa-raup-2-triliun-dollar-as-tiap-tahun-dari-kekayaan</a>
11	1 Nov	Republika	<b>Bappenas Luncurkan Panduan Penyusunan Pendanaan Biru</b>	<a href="https://www.republika.co.id/berita/rknutm383/bappenas-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru">https://www.republika.co.id/berita/rknutm383/bappenas-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru</a>
12	1 Nov	Koran Jakarta	<b>Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Bappenas Luncurkan Dokumen Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru</b>	<a href="https://koran-jakarta.com/perkuat-pertumbuhan-ekonomi-nasional-bappenas-luncurkan-dokumen-panduan-penyusunan-instrumen-pendanaan-biru?page=all">https://koran-jakarta.com/perkuat-pertumbuhan-ekonomi-nasional-bappenas-luncurkan-dokumen-panduan-penyusunan-instrumen-pendanaan-biru?page=all</a>
13	1 Nov	Bappenas.go.id	<b>Perkuat Ekonomi Biru Bappenas Luncurkan Panduan</b>	<a href="https://www.bappenas.go.id/id/berita/perkuat-ekonomi-biru-bappenas-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru-K1LpC">https://www.bappenas.go.id/id/berita/perkuat-ekonomi-biru-bappenas-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru-K1LpC</a>
14	1 Nov	Bisnis.com	<b>Bappenas Kemenko Marves dan Kemenkeu Luncurkan Pedoman Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru</b>	<a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593732/bappenas-kemenko-marves-dan-kemenkeu-luncurkan-pedoman-penyusunan-instrumen-pendanaan-biru">https://ekonomi.bisnis.com/read/20221101/9/1593732/bappenas-kemenko-marves-dan-kemenkeu-luncurkan-pedoman-penyusunan-instrumen-pendanaan-biru</a>
15	1 Nov	CNBC	<b>Pemerintah Rancang Skema Pendanaan Baru Begini Skemanya</b>	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20221101171042-17-384272/pemerintah-rancang-skema-pendanaan-baru-begini-skemanya">https://www.cnbcindonesia.com/market/20221101171042-17-384272/pemerintah-rancang-skema-pendanaan-baru-begini-skemanya</a>
16	1 Nov	Medcomm	<b>Bappenas Rekomendasikan Instrumen Yang Cocok Untuk Pendanaan Biru</b>	<a href="https://www.medcom.id/ekonomi/makro/ybJQJzjN-bappenas-rekomendasikan-instrumen-yang-cocok-untuk-pendanaan-biru">https://www.medcom.id/ekonomi/makro/ybJQJzjN-bappenas-rekomendasikan-instrumen-yang-cocok-untuk-pendanaan-biru</a>
17	1 Nov	Medcomm	<b>Blue Economy Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru</b>	<a href="https://www.medcom.id/ekonomi/sustainability/Wb7apoPK-blue-economy-bisa-jadi-sumber-pertumbuhan-ekonomi-baru">https://www.medcom.id/ekonomi/sustainability/Wb7apoPK-blue-economy-bisa-jadi-sumber-pertumbuhan-ekonomi-baru</a>
18	1 Nov	Medcomm	<b>Menteri PPN Blue Finance Jadi Landasan Strategi Transformasi Ekonomi</b>	<a href="https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNAra5Ab-menteri-ppn-blue-finance-jadi-landasan-strategi-transformasi-ekonomi">https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNAra5Ab-menteri-ppn-blue-finance-jadi-landasan-strategi-transformasi-ekonomi</a>
19	1 Nov	Merdeka	<b>Pemerintah Luncurkan Panduan Pendanaan Biru Dorong Ekonomi Berkelanjutan</b>	<a href="https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-luncurkan-panduan-pendanaan-biru-dorong-ekonomi-berkelanjutan.html">https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-luncurkan-panduan-pendanaan-biru-dorong-ekonomi-berkelanjutan.html</a>

20	1 Nov	idxchannel	<b>Perkuat Perekonomian Pemerintah Luncurkan Panduan Penyusunan Pendanaan Biru</b>	<a href="https://www.idxchannel.com/economics/perkuat-perekonomian-pemerintah-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru">https://www.idxchannel.com/economics/perkuat-perekonomian-pemerintah-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru</a>
21	1 Nov	Liputan6.com	<b>Biayai Proyek Kelautan Indonesia Butuh Skema Pendanaan Biru</b>	<a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/5113139/biayai-proyek-kelautan-indonesia-butuh-skema-pendanaan-biru">https://www.liputan6.com/bisnis/read/5113139/biayai-proyek-kelautan-indonesia-butuh-skema-pendanaan-biru</a>
22	1 Nov	Warta Ekonomi	<b>Perkuat Pembangunan Ekonomi Biru Inodnesia Bappenas Luncurkan Panduan Penyusunan Pendanaan Biru</b>	<a href="https://wartaekonomi.co.id/read456156/perkuat-pembangunan-ekonomi-biru-indonesia-bappenas-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru">https://wartaekonomi.co.id/read456156/perkuat-pembangunan-ekonomi-biru-indonesia-bappenas-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru</a>
23	1 Nov	Warta Ekonomi	<b>Kementerian PPN Bappenas Tengah Siapkan Roadmap Ekonomi Biru Indonesia</b>	<a href="https://wartaekonomi.co.id/read456289/kementerian-ppnbappenas-tengah-siapkan-roadmap-ekonomi-biru-indonesia">https://wartaekonomi.co.id/read456289/kementerian-ppnbappenas-tengah-siapkan-roadmap-ekonomi-biru-indonesia</a>
24	1 Nov	Indonesiakini.com	<b>Perkuat Ekonomi Biru Bappenas Luncurkan Panduan Penyusunan Pendanaan Biru</b>	<a href="https://indonesiakini.go.id/berita/9293820/perkuat-ekonomi-biru-bappenas-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru">https://indonesiakini.go.id/berita/9293820/perkuat-ekonomi-biru-bappenas-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru</a>
25	1 Nov	headtopic	<b>Biayai Proyek Kelautan Indonesia Butuh Skema Pendanaan Biru</b>	<a href="https://headtopics.com/id/biayai-proyek-kelautan-indonesia-butuh-skema-pendanaan-biru-31245746">https://headtopics.com/id/biayai-proyek-kelautan-indonesia-butuh-skema-pendanaan-biru-31245746</a>
26	2 Nov	Okezone	<b>Instrumen Pendanaan Biru Berkelanjutan</b>	<a href="https://economy.okezone.com/play/2022/11/02/4/156122/instrumen-pendanaan-biru-berkelanjutan">https://economy.okezone.com/play/2022/11/02/4/156122/instrumen-pendanaan-biru-berkelanjutan</a>
27	2 Nov	Sumutprov.go.od	<b>Pemerintah Luncurkan Panduan Pendanaan Biru Dorong Ekonomi Berkelanjutan</b>	<a href="https://diginomi.sumutprov.go.id/2022/11/02/pemerintah-luncurkan-panduan-pendanaan-biru-dorong-ekonomi-berkelanjutan/">https://diginomi.sumutprov.go.id/2022/11/02/pemerintah-luncurkan-panduan-pendanaan-biru-dorong-ekonomi-berkelanjutan/</a>
28	2 Nov	Semarak.co.id	<b>Perkuta Ekonomi Biru Kementerian PPN/ Bappenas Luncurkan Panduan Penyusunan Pendanaan Biru</b>	<a href="https://semarak.co/perkuat-ekonomi-biru-kementerian-ppn-bappenas-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru/">https://semarak.co/perkuat-ekonomi-biru-kementerian-ppn-bappenas-luncurkan-panduan-penyusunan-pendanaan-biru/</a>
29	2 Nov	MSN.com	<b>Suharso Monoarfa Indonesia Bisa Raih 2 Triliun US Daeri Ekonomi Biru Apakah Itu</b>	<a href="https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/suharso-monoarfa-indonesia-bisa-raih-2-triliun-us-dari-ekonomi-biru-apakah-itu/ar-AA13GeY3">https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/suharso-monoarfa-indonesia-bisa-raih-2-triliun-us-dari-ekonomi-biru-apakah-itu/ar-AA13GeY3</a>

30	2 Nov	MSN.com	<b>Kepala Bappenas Konsep Ekonomi Biru Jadi Solusi Tantangan Sistem Perekonomian Yang Eksploitatif</b>	<a href="https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/kepala-bappenas-konsep-ekonomi-biru-jadi-solusi-tantangan-sistem-perekonomian-yang-eksploitatif/arcid=FinanceShimLayer">https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/kepala-bappenas-konsep-ekonomi-biru-jadi-solusi-tantangan-sistem-perekonomian-yang-eksploitatif/arcid=FinanceShimLayer</a>
31	15 Nov	Mongabay	<b>Awal Pendaan Biru Semakin Dekat</b>	<a href="https://www.mongabay.co.id/2022/11/15/awal-pendanaan-biru-semakin-dekat/">https://www.mongabay.co.id/2022/11/15/awal-pendanaan-biru-semakin-dekat/</a>
32	21 Nov	Investor.id	<b>ICCTF Bappenas Identifikasi Sulut Jadi Lokasi Blue Carbon</b>	<a href="https://investor.id/national/228794/icctfbappenas-identifikasi-sulut-jadi-lokasi-blue-carbon">https://investor.id/national/228794/icctfbappenas-identifikasi-sulut-jadi-lokasi-blue-carbon</a>



**3**

## **AUDIT, KEUANGAN** Dan OPERASIONAL

## 1. Laporan Audit Tahun 2022

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara. Pada tahun 2022 ini BPK sudah selesai mengaudit Laporan Keuangan Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2021 dengan opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan audit untuk kegiatan Hibah Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) Tahun Anggaran 2021 juga sudah selesai diaudit oleh BPK Audit Khusus per 31 Mei 2022 juga dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## 2. Informasi Keuangan Periode Juli-September 2022

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan

semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2022 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 11,42M dengan *self-blocking* sebesar 576juta dan dana Hibah Luar Negeri (Hibah Terencana) sebesar 67,57M sehingga total dana yang dikelola ICCTF Tahun Anggaran 2022 adalah 78,99M. Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 73,24M yaitu 92,71% dari total dana yang dikelola.

**Tabel Rincian Penyerapan Dana sampai dengan bulan Desember tahun 2022**

Sumber Dana	Anggaran	Penyerapan	Sisa Anggaran
APBN - ICCTF	11.424.000.000	11.314.985.038 99%	109.014.962
Hibah – WorldBank (Reksus)	19.827.109.000	19.107.047.539 96%	720.061.461
Hibah – Asian Development Bank (Reksus)	47.746.039.000	42.818.885.756 90%	4.927.153.244
<b>TOTAL</b>	<b>78.997.148.000</b>	<b>73.240.918.333 93%</b>	<b>5.756.229.667</b>

### 3. Operasional / Kesekretariatan

Sampai pada Triwulan 3, jumlah tenaga professional yang mendukung kegiatan ICCTF berjumlah 28 Orang yang terdiri dari 14 konsultan dengan penugasan time base, 2 konsultan output base, 1 konsultan intermittent dan 10 tenaga jasa lainnya. Penyebaran gender terdiri dari 17 jenis kelamin laki-laki dan 11 jenis kelamin perempuan sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Pendanaan
1	Gabriel A. Wagey	Executive Director	Rupiah Murni (APBN)
2	Mega Gusti Rama	Finance and Operation Manager	Rupiah Murni (APBN)
3	Februanty Suyatiningsih	Program Manager	Rupiah Murni (APBN)
4	Anggri Heravanthi	Accounting Specialist	Rupiah Murni (APBN)
5	SiwiHandinah	General Adm dan HR Coordinator	Rupiah Murni (APBN)
6	Muhammad Wildan Kautsar	Knowledge Management Officer	Rupiah Murni (APBN)
7	Joshua Arianto M	Program Officer	Rupiah Murni (APBN)
8	Hans Budiarto I	Program Assistant	Rupiah Murni (APBN)
9	Affalia Maydi Hatika	Communication Assistant	Rupiah Murni (APBN)
10	Musfarayani	Communication Specialist	Rupiah Murni (APBN)
11	Eko Wahyudi	Finance and Administration Officer COREMAP-CTI WB	Rupiah Murni (APBN)
12	Agus Salim	Logistic and General Support	Rupiah Murni (APBN)
13	Sugihartono	Office Assistant	Rupiah Murni (APBN)
14	Muhamad Nuryanto	Database Assistant	Rupiah Murni (APBN)
15	Nur Jali	Procurement Officer	Rupiah Murni (APBN)
16	Andrian Firmansyah	Tenaga Operasional Perkantoran	Rupiah Murni (APBN)
17	Budiyanto	Pengemudi	Rupiah Murni (APBN)
18	Steven R. Limbong	PME Officer	Rupiah Murni (APBN)
19	Alya Prima Syanti	Financial Management Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
20	Leonas Chatim	Project Team Leader COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
21	Nia Kania	Administration Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
23	Nanda Sachra Y	Monev Specialist COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
24	Novita Fitrianingrum	Program Officer COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
25	Agus Salim	Site Coordinator Gili Matra	Hibah LN ADB
26	Lalu Alid Riadi	Site Coordinator Gili Balu	Hibah LN ADB
27	I Gede Wahyu Sena W	Site Coordinator Nusa Penida	Hibah LN ADB
28	Derick Prawira	Creative Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB



# LAPORAN 4 TRIWULAN 2022

